PROGRAM PELATIHAN BAGI WARGA MISKIN

(STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

EKA FARAH DEWI APHRODITA EMAWATI

NIM. 105030101111013

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. Mardiyono, MPA**
2. **Drs. Abdul Wachid, MAP**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati, 2014, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu administrasi, Universitas Brawijaya, **Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar)**, Dr. Mardiyono, MPA., Drs. Abdul Wachid, MAP., 133 hal + xvii

Meminimalisir kemiskinan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, karena masyarakat yang sejahtera tentunya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola negaranya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan secara gratis di Kota Blitar. Karena upaya meminimalisir kemiskinan tidak terbatas pada pendidikan formal saja, pelatihan lukis kaca, service hp, dan budidaya jamur bisa menjadi alternatif pemerintah membekali keterampilan bagi warga miskin yang terbatas akan pendidikan dan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan bagi warga miskin, serta faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah meotode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitian adalah program pemerintah dalam menangani warga miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang didalamnya meliputi kelompok sasaran warga miskin dan program pelatihan yang terdiri dari lembaga, jenis, instruktur, sarana prasarana, jadwal, metode, bantuan pemerintah, dan penerapan pelatihan sebagai pekerjaan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah program pelatihan bagi warga miskin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara gratis sudah berjalan cukup baik berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Dimana pemerintah menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan di luar instansi dalam memberikan pelatihan. Tentunya dengan dibimbing instruktur yang profesional dan berpengalaman, tempat pelatihan dengan kelengkapan sarana prasarana, metode pelatihan yang sesuai dengan karakter warga miskin, hingga pemberian bantuan modal maupun alat secara kelompok dari pemerintah yang bisa digunakan sebagai modal usaha nantinya. Namun dalam pelaksanaan program ini masih terdapat hambatan baik itu dari dalam yang meliputi kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, dan banyaknya kerjaan dinas sehingga rencana tidak tepat waktu. Sedangkan hambatan dari luar berkaitan dengan tingkat keseriusan warga miskin dalam mengikuti pelatihan sangat rendah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu, sebaiknya dalam memberikan program pelatihan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kerja Kota Blitar meningkat kinerjanya sehingga rencana program yang disusun bisa terlaksana tepat waktu dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar warga miskin di Kota Blitar mengetahui program pelatihan gratis ini. Selain itu, pemberian bantuan modal usaha dan alat dari pemerintah bersifat individu bukan kelompok.

Kata kunci : Pemberdayaan, warga miskin, program pelatihan, modal usaha

SUMMARY

Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati, 2014, The Science of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University, **Training Program for the Poor Societies (Study on Social and Labor Depaterment of Blitar City)**,. Dr. Mardiyono, MPA., Drs. Abdul Wachid, MAP., 133 page + xvii

To minimize poverty in support of welfare is the responbility of the state, because the societies who are prosperous demonstrated success of government in managing their country. It is like happened in Blitar City that societies empowerment can be done through training program for free. It happen because efforts to minimize poverty is not only limited in formal education. The grafier course, service handphone, and mushroom cultivation can be alternative by government to give skills for societies who are poor and they are who limited education and finance. The purposes of this research are to know the implementation of training program for poor societies, the factors that can support and chase the program.

The research method which be used is descriptive method through the qualitative approach. The research focuss on government programs to handle poor societies in the Social and Labor Departement of Blitar City which the focus consist of the target group of poor societies and the training programs that includes institution, kind of training, instructor, infrastructure, schedule, method, governments help and implentation training for the job. The techniques of collected data are through interview, observation, and documentation. The waies of analys data are collected data, reduction data, presentation data, and the with drawal of the conclusion.

The result of the research is training program for poor societies through Social and Labor Departement of Blitar City for free that it has been running quite well with regard to the empowerment of human resources. The government join partnership with training institution which it is out of institution. The instructors led course with profesional and experienced, the training place with the complete infrastructure, training method which is suitable with poor societies characters, until giving finance and giving tool in group from government that can be usedas a bussiness. However, in this implementation programs are still resistance either from within thaat include the decreasing of socialiszation program to societies, and many jobs in the institution so the planning is not ontime. Beside that the resistance of outside is related to the seriousness level of poor societies in joining the training is low.

Based on result research there are many recomendations which the researcher can give to government, the government especially, Social and Labor Departement of Blitar City should improve its peformance so the planning of the programs that are arranged can be done on time and socialized to societies, so that the poor societies in Blitar City know the free training programss. Beside that, the giving finance bussiness and tool from the government in individually not in a group.

Key word : Empowerment, The poor societies, training program, finance for bussiness.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PROGRAM PELATIHAN BAGI WARGA MISKIN (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Mardiyono, MAP selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, MAP selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu selama menempuh masa studi di Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
7. Bapak Didik selaku instruktur dan pemilik Warna Garden pelatihan budidaya jamur yang telah membantu selama penelitian.

8. Bapak Wanto selaku instruktur dan pemilik MB Glass pelatihan lukis kaca (grafier) yang telah membantu selama penelitian.
9. Bapak Drs. Mahendra selaku pemilik BLK Otomotif dan LPK Intermedia pelatihan service hp beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
10. Bapak/Ibu peserta pelatihan budidaya jamur, service hp, dan lukis kaca (grafier) yang telah membantu selama penelitian.
11. Orang Tua saya Bapak Wirawan Tono, S.H dan Ibu Hariyani yang telah mendidik, mecurahkan kasih sayang, memberikan doa, dan dukungan selama ini.
12. Adik saya Ranieva yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.
13. Eyang, Om, Tante dan semua keluarga besar terima kasih atas perhatian , dukungan, dan arahan serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Semua sahabat Anik, Sella, Maya, Dida, Dian, Amel, teman kontrakan Yaning, Mbak Chaca, dan semua teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan kebersamaan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman teman Administrasi Publik khususnya angkatan 2010 dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang bersedia membantu, dan mendukung demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2013

Penulis

Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
RINGKASAN ..... **v**
SUMMARY ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kontribusi Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Administrasi Publik 10
1. Pengertian Administrasi Publik 10
2. Peran Administrasi Publik 11
B. Pemberdayaan Masyarakat 13
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 13
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 13
3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 16
C. Kemiskinan 17
1. Pengertian Kemiskinan 17
2. Jenis Kemiskinan 18
3. Ciri-ciri Kemiskinan 19

4. Penyebab Kemiskinan..... 20
D. Pelatihan..... 21
1. Pengertian Pelatihan..... 21
2. Komponen Pelatihan..... 22
3. Sasaran Pelatihan..... 23
4. Proses Pelatihan..... 24
5. Metode Pelatihan..... 25
6. Pelatih..... 28

BAB III METODE PENELITIAN..... 29
A. Jenis Penelitian..... 30
B. Fokus Penelitian..... 31
C. Lokasi dan Situs Penelitian..... 31
D. Sumber dan Jenis Data..... 33
E. Teknik Pengumpulan Data..... 35
F. Instrumen Penelitian..... 36
G. Analisis Data..... 37
H. Keabsahan Data..... 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 42
A. Gambaran umum..... 42
1. Gambaran umum wilayah Kota Blitar..... 42
a. Keterangan Kota Blitar..... 42
b. Letak geografis..... 43
c. Sejarah pemerintahan..... 48
d. Arti dan lambang Kota Blitar..... 50
e. Visi dan misi Pemerintah Kota Blitar..... 52
2. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar..... 56
a. Sususnan dan struktur organisasi..... 56
b. Tugas pokok dan fungsi..... 57
c. Visi dan misi..... 60
d. Sasaran..... 61
e. Landasan hukum..... 62
f. Sumber daya manusia..... 62

g. Sarana dan prasarana..... 64
B. Penyajian Data Fokus Penelitian..... 66
1. Program pemerintah dalam menagani warga miskin melalui pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar..... 66
a. Kelompok sasaran warga miskin..... 67
b. Program pelatihan..... 77
b.1 Lembaga pelatihan..... 78
b.2 Jenis pelatihan yang diberikan..... 80
b.3 Instruktur pelatihan..... 81
b.4 Sarana dan prasarana..... 83
b.5 Jadwal pelatihan..... 85
b.6 Metode pelatihan..... 90
b.7 Bantuan dari pemerintah bagi peserta pelatihan..... 92
b.8 Penerapan pelatihan sebagai pekerjaan..... 96
2. Faktor yang mempengaruhi program pelatihan bagi warga miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar..... 97
a. Faktor pendukung..... 97
a.1 Faktor pendukung internal..... 98
a.2 Faktor pendukung eksternal..... 99
b. Faktor penghambat..... 101
b.1 Faktor penghambat internal..... 101
b.2 Faktor penghambat eksternal..... 103
C. Analisis Data Fokus Penelitian..... 104
1. Program pemerintah dalam menagani warga miskin melalui pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar..... 104
a. Kelompok sasaran warga miskin..... 107
b. Program pelatihan..... 110
b.1 Lembaga pelatihan..... 111
b.2 Jenis pelatihan..... 111
b.3 Instruktur pelatihan..... 112
b.4 Sarana dan prasarana..... 112
b.5 Jadwal pelatihan..... 113
b.6 Metode pelatihan..... 113

b.7 Bantuan dari pemerintah bagi peserta pelatihan..... 114
b.8 Penerapan pelatihan sebagai pekerjaan..... 115
2. Faktor yang mempengaruhi program pelatihan bagi warga miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar..... 115
a. Faktor pendukung..... 115
a.1 Faktor pendukung internal..... 116
a.2 Faktor pendukung eksternal..... 116
b. Faktor penghambat..... 116
b.1 Faktor penghambat internal..... 117
b.2 Faktor penghambat eksternal..... 117

BAB V PENUTUP..... 118
A. Kesimpulan..... 118
B. Saran..... 121

DAFTAR PUSTAKA..... 124
LAMPIRAN..... 127

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	39
2.	Peta Administrasi Kota Blitar.....	43
3.	Lambang Kota Blitar.....	51

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Luas Wilayah Kota Blitar.....	44
2.	Daftar Nama Warga Miskin Peserta Pelatihan.....	72
3.	Jadwal Pelatihan Bagi Warga Miskin.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Surat Pengantar Bakesbang.....	127
2.	Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	128
3.	Daftar Wawancara.....	129
4.	Dokumentasi Peneliti.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan yang dihadapi oleh negera berkembang seperti Indonesia memang sudah bisa ditebak. Kemiskinan menjadi masalah utama dari dulu hingga sekarang mulai penjajahan dan bertahan hingga jaman kemerdekaan. Masih sangat sulit untuk di tangani meskipun pemerintah selalu berupaya untuk mengatasinya dan diimplementasikannya dalam berbagai bentuk program untuk kesejahteraan kemasyarakatan. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang hidup sejahtera, adil dan makmur.

Namun hingga saat ini kemiskinan begitu terlihat jelas di kota-kota dimana jumlah orang miskin di daerah perkotaan semakin bertambah disebabkan 2 hal. Menurut Kuntjoro (1986:40) : penambahan alamiah yaitu lebih banyak angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematian, dan migrasi orang-orang pedesaan yang miskin pindah ke kota. Adanya perbedaan pendapatan daerah antara perkotaan dengan pedesaan membuat sebagian besar penduduk desa beranggapan bahwasannya kehidupan di kota lebih menjamin kesejahteraannya dibandingkan harus hidup di daerah pedesaan. Tapi justru berbanding arah dengan kenyataan. Kehidupan di perkotaan justru membuat mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mencari lapangan pekerjaan begitu sulit.

Pembangunan sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dimaksudkan agar tercipta suatu perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Dinamika perubahan ini bisa ditandai dari pergerakan maju kehidupan masyarakat dari tidak layak dan serba kekurangan menuju ke kehidupan yang lebih baik dan sejahtera baik secara material maupun secara spiritual. Seperti yang diungkapkan oleh Ridwan dan Achmad Sodik (2010:53) bahwa negara yang sejahtera mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Pengentasan kemiskinan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara seharusnya dibentuk melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu diperlukan peran birokrasi yang sesungguhnya yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjadikan prioritas utama dalam misi pembangunan. Publik sendiri adalah masyarakat umum yang memang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator. Namun misi pembangunan itu sendiri juga seringkali tidak berjalan mulus seperti yang diungkapkan oleh Budiman (2000:1) bahwa pembangunan saat ini justru menemui kebuntuan. Pembangunan saat ini semakin kehilangan daya pikat, praktek dan wacana pembangunan saat ini berada dalam titik kritis akibat berbagai ketidakselarasan dan kesenjangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menciptakan perubahan yang diharapkan lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rupannya belum menyentuh warganya. Hal ini bisa

terlihat dari banyaknya warga miskin di kota-kota besar. Melihat kondisi yang seperti ini pemerintah berusaha meminimalisir hingga mentiadakan keberadaan warga miskin. UU 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", artinya bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan warga miskin.

Pemberdayaan warga miskin melalui pelatihan bisa menjadi program pemerintah saat ini agar tidak tercipta pengganggguran yang semakin menumpuk di negara kita yang kemudian menjadi beban negara. Karena upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tidak terbatas pada penyelengaaraan pendidikan formal saja. Penyediaan lembaga pelatihan dan tenaga pelatih yang profesional untuk menjamin keberhasilan pemberdayaan warga miskin melalui pelatihan bisa menjadi satu alternatif yang cukup bagus dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena melalui pelatihan warga miskin bisa memperoleh bekal ilmu untuk mengembangkan usahanya, tentunya mampu meningkatkan penghasilan mereka yang kemudian menjadikan kualitas hidup mereka semakin baik. Pada gilirannya warga miskin yang diberdayakan nantinya diharapkan untuk membekali anak-anak mereka dengan keahlian yang diperolehnya melalui pelatihan selain harus menjalani pendidikan formal.

Penduduk Kota Blitar sendiri sebanyak 145.300 jiwa sedangkan warga miskin Kota Blitar sebanyak 13.182 yang terdiri dari 5.061 warga miskin di Kecamatan Sukorejo, 3.969 warga miskin di Kecamatan Kepanjen Kidul dan 4.152 warga miskin di Kecamatan Sananwetan. (Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2013:6).

Hal ini artinya pemeritah menanggung sekitar 13.182 penduduk yang berstatus sebagai warga miskin di Kota Blitar. Dengan begitu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kota Blitar, salah satunya dengan memberikan pelatihan gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Meskipun yang menyusun program adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini dalam menjalankan proses pelatihan bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang lain. Kerjasama ini untuk menjamin kelancaran proses pelatihan karena pada lembaga pelatihan tentunnya memiliki instruktur yang profesional serta perlengkapan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai.

Pemberian bantuan bagi peserta pelatihan juga sebagai pendukung keberhasilan program pemerintah ini, nantinya bisa dipergunakan untuk pengembangan usaha sesuai dengan bidang atau jenis pelatihan yang diambilnya tersebut. Dengan begitu keahlian yang dimiliki warga miskin bisa menjadi bekal dalam mencari lapangan pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Namun dalam perkembanganya, program pelatihan yang diberikan masih belum diterapkan sebagai modal usahanya untuk menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Justru mereka kembali ke pekerjaan semula sebagai pekerja serabutan yang tidak tentu penghasilannya setiap hari. Kendala pada modal dan juga peralatan yang dibutuhkan menjadi faktor pemicu untuk warga miskin mengurungkan tidak membuka peluang usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang program pemerintah menangani warga miskin yang memang pada dasarnya adalah mereka yang bekerja serabutan, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga tidak mampu berinvestasi untuk masa depannya nanti. Pelatihan bagi warga miskin di Kota Blitar ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam hal ini peran pemerintah sangat dominan terutama dalam hal penyusunan program dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu peneliti memberi judul

"PROGRAM PELATIHAN BAGI WARGA MISKIN (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelititan ini adalah :

1. Bagaimanakah program pelatihan bagi warga miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program pelatihan bagi warga miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis program pelatihan bagi warga miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat program pelatihan bagi warga miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Blitar.

D. Kontribusi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai program pemerintah untuk menangani warga miskin, memberikan sumbangan dalam aspek teoritis yaitu bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada bidang pembangunan melalui program pelatihan keterampilan untuk warga miskin, memperluas wawasan dalam berfikir, analisis, dan membandingkan realitas di lapangan dengan teori-teori yang ada, selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan Dinsosnaker serta sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang membahas fenomena yang sama.

2. Kontribusi Praktis

   a. Sebagai input Dinsosnaker Kota Blitar khususnya Bidang Sosial dalam pemberdayaan warga miskin.

   b. Bagi masyarakat sebagai faktor pendorong agar terpacu untuk berperan serta dalam mendukung program pemerintah menangani warga miskin melalui pelatihan secara gratis ini.

   c. Memberikan kontribusi pemikiran bagi bidang sosial dan dinas terkait lainnya dalam menyusun program kerja untuk pemberdayaan warga miskin di Kota Blitar.

   d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wawasan dan gambaran serta bisa dijadikan dasar bagi pemerintah dan pelaku *stakeholder* yang terlibat untuk lebih memperhatikan program dalam menangani warga miskin.

   e. Memberikan manfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat mengetahui kehidupan yang dialami oleh warga miskin, menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap nasib warga miskin, serta lebih menghargai hak-hak yang semestinya diterima warga miskin.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memprmudah penulisan, disini penulis membagi sistematika pembahasan dalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Landasan Teori yang terdiri dari : Administrasi Publik yang meliputi pengertian administrasi publik, ruang lingkup, dan peran adminitrasi publik. Kemiskinan yang meliputi pengertian kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan, dan penyebab kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengertian pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Pelatihan keterampilan meliputi pengertihan pelatihan, komponen pelatihan, sasaran pelatihan, proses pelatihan dan metode pelatihan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh

peneliti, yaitu mengenai fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dataa, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang mungkin dapat penulis berikan atas adanya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu. Administrasi publik menurut Pasolong (2008:8) adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pfiffner dan Presthus (Syafiie 2006:23) bahwa administrasi publik antara lain :

a. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
b. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakankebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
c. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Untuk menyamakan persepsi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud administrasi, Nicholas Henry (Pasolong 2008:8) berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam

hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik itu berusaha mengembangkan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dalam perkembanganya administrasi publik juga biasa disebut dengan administrasi negara. Karena pada dasarnya pengertian dari administrasi publik dan administrasi negara memang sama. Seperi yang dikemukakan oleh Siagian (2009:7) bahwa administrasi negara secara singkat dan sederhana didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Jadi Administrasi publik adalah sekelompok orang yang terdiri dari 2 atau lebih yang bekerja melaksanakan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Peran Administrasi Publik

Peran administrasi publik dalam suatu negara itu sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Gray (Pasolong 2008:18) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut :

a. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
b. Administrasi publik melindungi hak hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan

tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

c. Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Dijelaskan juga oleh Thoha (Pasolong 2008:19) bahwa peran administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat, alasan seperti itu teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Jadi peran administrasi publik adalah menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menetukan dan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum yang berkaitan dengan warganya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memang sangat diperlukan apalagi pemberdayaan ini di fokuskan kepada rakyat miskin. Rata-rata masyarakat miskin dikarenakan keterbatasan dirinya dalam berusaha, selain keterbatasan modal, keterbatasan keterampilan yang dimiliki juga sangat minim. Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suryono dan Trilaksono (2008:25) bahwasannya pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment"* yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga diungkapkan oleh White (Suhendra 2006:77) yaitu sebagai suatu upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian.

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat memulai proses kegiatan dengan menggali potensi diri kemudian diaktualisasikaan dalam suatu kegiatan yang menghasilkan kemandirian.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan memang sudah mulai dikenal di Indonesia, dan dalam perkembangannya istilah pemberdayaan menjadi wacana publik dan bahkan gtelah menjadi kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Untuk meminimalisir kegagalan maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya seperti yang diungkapkan oleh Jim Ifa (Zubaedi 2007:45) yang membagi strategi pemberdayaan masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
b. Pemberdayaan masyarakat melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
c. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui 5 strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan menurut Suharto (1997:218-219) :

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang kecil.

d. Penyongkongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat miskin agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjaamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap kesempatan berusaha.

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya meliputi pendidikan, pembekalan keterampila, serta pemeberian dukungan.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat 3 pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin menurut Soegijono (Suryono dan Trilaksono 2008:26) yakni :

a. Pendekatan yang terarah

   Maksutnya pemberdayaan masyarakat harus terarah dan berpihan kepada orang miskin.

b. Pendekatan kelompok

   Artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.

c. Pendekatan pendampingan

   Yaitu dilakukan selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang terarah dalam memecahkan masalah yang memudahkan berjalannya strategi dalam pemberdayaan masyarakat ini.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan saat ini memang menjadi masalah utama pada setiap negara berkembang seperti Indonesia. Suryono (2010:233) mengungkapkan pengertian kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesbilitas pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya.

Masalah kemiskinan memang merupakan isu sentral yang memang tidak pernah berakhir, terutama setelah Indonesia dilanda krisis. Soemarno (1996:5) pun mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi kesenjangan dan ketimpangan, masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada peluang dan kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh di masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi dan akses yang lebih baik.

Pengertian kemiskinan juga bisa dilihat dari 2 aspek seperti yang telah diungkapkan oleh Mardimin (Suryono 2004:102) yaitu :

a. Aspek kualitatif

   Kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia yang tidak layak sebagai manusia atau tidak bermartabat manusia.

b. Aspek kuantitatif

   Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau tidak berharta benda.

Jadi kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseoarang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan untuk setiap bulan sehingga memiliki akses yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan.

2. Jenis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan pencerminan kegagalan dari suatu sistem pada masyarakat dan negara dalam mengelola sumber daya dan dana secara adil kepada warga negaranya. Oleh karena itu kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 jenis Suryono (2004:101) , yaitu :

a. Kemiskinan absolut

   Dimana sekelompok orang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. Kemiskinan relatif

   Adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (di satu wilayah), dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya di tempat lain.

Kemiskinan sendiri sebenarnya berkaitan dengan ketidak mampuan untuk memebuhi kebutuhan hidup dasar. Berdasarkan jenisnya menurut Soegijoko dan Esmara (Ridlo 2001: 10) membagi kemiskinan secara umum menjadi :

a. Kemiskinan absolut

   Terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah gariss kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

b. Kemiskinan relatif

Merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang tersebuttelah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya.

Jadi kemiskinan dalam kenyataannya terbagi menjadi 2 jenis kemiskinan yaitu disebut miskin karena memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat terbatas, serta dikatakan miskin apabila seseoarang kebutuhan dasar terpenuhi secara layak namun kualitasnya masih rendang dibanding warga sekitar yang relatif kaya.

3. Ciri-ciri Kemiskinan

Tidak semua masyarakat tidak mampu disebut miskin. Mereka yang miskin adalah meraka yang memiliki kelemahan dalam kemampuan berusaha dan keterbatasan dalam mengakses peluang usaha. Oleh sebab itu SMERU (Surjono dan Trilaksono 2008:46) memaparkan ciri-ciri kemiskinan, yaitu terdiri dari :

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi).
c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
g. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

h. Ketidakmampian dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok terpencil).

Bila berbicara mengenai kemiskinan, kebanyakan dari orang berpikiran pada kondisi yang yang serba kekurangan dan akses yang serba terbatas dalam segala bidang. Suryawati (Salim 1984:44) mengemukakan ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut :

a. Rata-rata tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan.
b. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
c. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
d. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutanfasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial.

Ciri kemiskinan pada dasarnya adalah keadaan dimana terbatas akan pemenuhan kenutuhan dasar (sandang, pangan, papan), dan tidak adanya investasi untuk menunjang kehidupan di masa depan.

4. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor yang ada pada diri seseorang itu sendiri yang kemudian mengakibatkan kemiskinan. Namun ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan seperti yang telah diungkapkan oleh Syaifullah (2008:21-22) yang meliputi :

a. Penyebab individual
   Melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari diri seseorang itu sendiri.
b. Penyebab keluarga
   Menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
c. Penyebab subbudaya
   Menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
d. Penyebab agensi
   Melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain seperti pemerintah termasuk perang.

e. Penyebab struktural
Memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial misalnya lemahnya sistem birokrasi dan minimnya kesadaran hukum.

Hal serupa juga disebutkan oleh Baswir (Suryono 2004:101) mengenai jenis-jenis sekaligus penyebab-penyebab kemiskinan yang meliputi :

a. Kemiskinan natural

Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti cacat fisik atau karena suatu hal seperti bencana alam.

b. Kemiskinan kultural

Adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti ketidakdisiplinan atau malas.

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata.

Penyebab kemiskinan diantaranya adalah akibat keterbatasan sumber daya alam di suatu daerah, sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, ketidak seimbngan antara para pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

D. Pelatihan

1. Pengertian Pelatihan

Kebanyakan keberadaan masyarakat miskin minim akan keterampilan yang dimiliki, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menyambung dan

memnuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Program pelatihan sangat diperlukan agar seseoarang bisa mengembangkan kemadirian pribadinya. Menurtu Daft (2011:122) mengartikan pelatihan dan pengembangan sebagai upaya terencana yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi calon pegawai tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan.

Suatu pelatihan yang dilaksanakan pada hakikatnya berorientasi menekankan pada tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Pelatihan menurut Wibowo (2007:442) bahwa pelatihan dan pengembangan sebagai suatu hal yang melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat menggunakannya dalam suatu pekerjaan. Pelatihan diperlukan seseorang untuk membantu menambah modal keterampilan agar bisa digunakan dalam suatu pekerjaan. Pelatihan juga diartikan oleh As'ad (Sutrisno 2009:72) yang mengartikan bahwa pelatihan menyangkut usaha-usaha terencana yang diselenggarakan supaya dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan adalah suatu usaha pembelajaran yang terarah untuk memperoleh keterampilan untuk bisa digunakan dalam pekerjaan.

2. Komponen Pelatihan

Adapun komponen yang diperlukan agar pelatihan tersebut bisa berjalan secara optimal menurut Richardson (Sutrisno 2009:73-74) perencanaan strategi yang melibatkan pelatihan meliputi berbagai komponen, yaitu :

a. Meningkatkan tingkat *skill* seseorang saat ini.
b. Menyeleksi tempat yang paling fleksibel dan menjadwalkan program.
c. Memilih metode pelatihan yang paling tepat.
d. Mengumpulkan dan mengembangkan materi pelatihan.
e. Mengevaluasi pelatihan.

Agar pelatihan yang diprogramkan untuk warga miskin bisa maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan, maka harus merumuskan komponen secara tepat. Menurut Mangkunegara (2009:51) ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pelatihan, yaitu :

a. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat terukur.
b. Para pelatih harus ahlinya yang berkualitas memadai (profesional)
c. Materi pelatihan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
d. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.
e. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen pelatihan agar pelatihan tersebut bisa berhasil yaitu adanya keterlibatan peserta pelatihan itu sendiri, adanya pelatih yang profesional, pemberian materi yang disertai dengan metode pelatihan yang sesuai serta keberadaan sarana dan prasarana pelatihan.

3. Sasaran Pelatihan

Sasaran pelatihan dan pengembangan SDM menurut Sutrisno (2009:74-75) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan produktivitas kerja
   Pelatihan dapat meningkatkan *performance* kerja pada posisi sekarang. Kalau *level of performance*-nya naik/ meningkat maka berakibat peningkatan dari produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi perusahaan.
b. Meningkatkan mutu kerja
   Ini berarti merupakaan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan lebih sedikit berbuat kesalahan dalam suatu organisasi.
c. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM
   Pelatihan yang baik bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan di masa yang akan datang. Apabila ada lowongan maka akan secara mudah diisi oleh tenaga-tenaga dari dalam organisasi itu sendiri.

d. Meningkatkan moral kerja
   Apabila suatu perusahaan menyelenggarakan program pelatihan yang tepat, maka iklim dan suasana suatu organisasi pada umumnya akan menjadi lebih baik. Dengan iklim kerja yang sehat, maka moral kerja juga akan meningkat.
e. Menjaga kesehatan dan keselamatan
   Suatu pelatihan yang tepat akan membantu menghindari timbulnya kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Selain daripada itu lingkungan kerja akan menjadi lebih aman dan tentram.
f. Menunjang pertumbuhan pribadi
   Dimaksudkan bahwa program pelatihan yang tepat sebenarnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Bagi tenaga kerja jelas bahwa dengan mengikuti program pelatihan akan lebih memasakkan dalam bidang kepribadian, intelektual, dan keterampilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran pelatihan pada dasarnya untuk menciptakan kemandirian pada seseorang melalui pendidikan keterampilan untuk menggali potensi yang telah dimiliki sehingga dapat digunakan dalam modal usaha.

4. Proses Pelatihan

Proses pelatihan adalah suatu langkah yang dilakukan untuk menunjang pelatihan tersebut untuk lebih terarah. Ada 5 langkah proses yang harus diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan Dessler (2008:281) yaitu :

a. Langkah analisis kebutuhan
   Yaitu mengetahui keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan, menganalisis keterampilan, dan mengembangkanpengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi.
b. Merencanakan intruksi
   Untuk memutuskan, menyusun, dan mengahasilkan isi program pelatihan termasuk buku kerja, latihan, dan aktifitas.
c. Validasi
   Dimana orang-orang yang terlibat membuat sebuah program pelatihan dengan menyajikannya kepada beberapa pemirsa yang dapat mewakili.
d. Menerapkan program tersebut
   Yaitu melatih seseorang yang ditargetkan.
e. Evaluasi dan tindak lanjut
   Dimana manajemen ini menilai keberhasilan atau kegagalan program ini.

Dalam pelatihan diperlukan tahapan atau proses yang tepat, agar pelatihan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan urutan-urutan yang dimulai dari pelatihan dasar. Mangkunegara (2009:52) menyebutkan tahapan yang diperlukan dalam pelatihan yaitu :

a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.
b. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan.
c. Menetapkan keberhasilan dengan alat ukurnya.
d. Menetapkan metode pelatihan.
e. Mengadakan percobaan dan revisi.
f. Mengimplementasikan dan mengevaluasi.

Dalam memberikan pelatihan tetunya harus sesuai dengan urutan pelatihan yang benar untuk memudahkan peserta pelatihan dalam menjalankan pelatihan tersebut, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan peserta pelatihan, pembekalan materi, mengaktualisasikan teori tersebut secara langsung melalui metode pengajaran yang sesuai dengan karakter peserta pelatihan serta mngevaluasi jalannya pelatihan tersebut.

5. Metode Pelatihan

Metode pelatihan merupakan suatu cara-cara yang dilakukan untuk memudahkan objek yang dilatih agar lebih memahami instruksi secara cepat. Dessler (2008:285-295) dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management menyatakan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pelatihan agar lebih efektif, yaitu :

a. *On the job training* (pelatihan langsung kerja)
   Yaitu meminta seseorang untuk mempelajari pekerjaan itu dengan langsung mengerjakannya. Dalam pelatihan ini metode yang paling dikenal adalah metode membimbing *(coaching)* atau sambil belajar *(understudy).*
b. Magang

Adalah suatu proses terstruktur dimana orang menjadi seorang pekerja yang terampil melalui kombinasi dari pelajaran di kelas dan pelatihan langsung di pekerjaan.

c. Belajar secara informal
Melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan kolaborasi dengan kolega mereka.

d. *Job Instruction Training*
Dalam memulai suatu pelatihan, membuat urutan langkah yang dibutuhkan dalam pekerjaan, masing-masing urutan dalam rangkaian yang tepat. Mendaftarkan hal yang penting sehingga terlihat apa yang harus dilakukan dan hal penting memperlihatkan bagaimana dan mengapa hal itu harus dilakukan.

e. Pengajaran
Merupakan cara yang cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok orang yang dilatih.

f. Pelajaran yang terprogram
Medianya dapat berupa buku teks, komputer, atau internet. Pelajaran yang terprogram adalah metode belajar sendiri langkah demi langkah yang terdiri dari 3 bagian :
   1. Menyajikan pertanyaan, fakta, atau permasalahan atau orang yang belajar.
   2. Mengijinkan orang itu untuk memberikan respon.
   3. Memberikan timbal balik untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

g. Teknik pelatihan kemampuan membaca dan menulis

h. Pelatihan dengan peralatan audiovisual
Yaitu pelatihan dengan menggunakan film, powerpoint, video, konferensi, kaset audio, kaset video yang sangat efektif dan sangat luas digunakan.

i. Pelatihan dengan simulasi
Adalah sebuah metode dimana orang-orang yang dilatih belajar dengan peralatan yang sebenarnya atau dengan simulasi yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan, tapi sebenarnya mereka dilatih diluar pekerjaan.

j. Pelatihan berbasis komputer (CBT) *Computer Bassed Training*
Orang-orang yang dilatih menggunakan sistem berbasis komputer dan atau CD-ROM untuk secara interaktif meningkatkan pengetahuan atau keterampilannya. CBT mengurangi waktu belajar 50%, dan menghemat biaya, meningkatkan motivasi seseorang.

k. Pelatihan jarak jauh berbasis Internet meliputi :
   1. Teletrianing
      Yaitu pelatihan dengan media sambungan televisi dimana seorang pelatih berada di lokasi pusat dan berada di tempat berbeda dengan seseorang yang dilatih.
   2. Konferensi-video
      Mengijinkan seseorang dalam satu lokasi untuk berkomunikasi langsung melalui sebuah kombinasi dari peralatan audio dan visual dengan orang di kota atau negara lain
   3. Pelatihan melalui internet

Seorang pelatih mengirim program-program pelatihan secara online sehingga orang yang dilatih bisa mengakses program tersebut kapan saja.

Metode merupakan suatu cara untuk menyampaikan materi kepada peserta pelatihan oleh instruktur pelatihan dengan tujuan mempermudah menerima materi yang diberikan. Mangkunegara (2009:58) membagi metode pelatihan menjadi :

a. On the job

   Pelatihan dilakukan di tempat kerja dan pada waktu jam kerja dengan memperhatikan pegawai yang berpengalaman. Prosedur metode ini informal, observasi sederhana dan mudah serta praktis. Pegawai mempelajari pekerjaan lain yang sedang bekerja.

b. On site but not on the job

   Pelatihan dilakukan di tempat kerja pegawai tersebut tetapi pelaksanaan dari pelatihan ini di luar jam kerja, sehingga tidak mengganggu jam kerja.

c. Off the job

   Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan tentunya dilakukan di luar jam kerja dan diluar tempat kerja. Jadi dilaksanakan di tempat terpisah dan waktu tertentu.

Jadi pada dasarnya metode pelatihan yang digunakan adalah pembekalan materi dan teori melalui tekhnik pengajaran selanjutnya adalah praktek kerja langsung menggunakan simulasi alat sesuai dengan bidang pelatihan yang ditekuni.

6. Pelatih

Untuk menjalankan program pelatihan diperlukan pelatih yang berkompeten terhadap bidang-bidang yang ditekuninya. Karena pelatih ini membantu memberikan pembinaan atau pengajaran mengenai keahlian yang dimiliki kepada peserta dalam forum pelatihan tersebut. Pengertian pelatih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:644) pelatih adalah orang yang memiliki keahlian dan melatih mengenai keahlian yang dimilikinya tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan mutlak yang harus dikuasai oleh penulis. Karena dalam menyelesaikan suatu tugas, penulis tidak bisa terlepas dari penelitian terlebih dahulu yang harus menggunakan metode penelitian yang benar dan tepat, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan bisa benar dan terarah. Metode penelitian juga membantu mempermudahkan penulis untuk memecahkan suatu masalah-masalah penelitian, dan juga mengembangkan ilmu-ilmu yang digeluti serta memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Metode penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:740) adalah sebagai suatu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1989:8) adalah :

> "Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metose penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya".

Sehingga metode penelitian menurut Nazir (1999:51) dalam bukunya Metode Penelitian sebagai cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, pengumpulan data-data harus sesuai dengan objek dan masalah yang diteliti. Agar hasil penelitian itu bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis deskriptif yang menurut Azwar (2013:6) dalam bukunya Metode Penelitian mengungkapkan bahwa :

> "penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematika sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.".

Sedangkan tujuan penelitian deskriptif menurut Azwar (2013:7) yaitu menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

Pendekatan kualitatif menurut Azwar (2013:5) yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.

Jadi penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pembacaan, menggambarkan kejadian, kemudian menguraikan selanjutnya menginterprestasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk

penulisan yang sistematis. Sehingga diperlukan obyek permasalahan dalam penelitian untuk menentukan waktu waktu dari permasalahan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan dalam penelitian karena untuk membatasi studi dalam penelitian ini, sehingga objek yang diteliti tidak meluas. Fokus penelitian terbagi menjadi 2 maksud meurut Moleong (2005:22), yaitu :

a. Penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang itu sendiri. fokus merupakan batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan data maupun melakukan pembahasan nantinya.
b. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan-mengeluarkan (inclusia-exclusia kriteria. Suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan tahu oersis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan jadi tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang dikumplkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan tentang data mana yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Program Pemerintah Dalam Menangani Warga Miskin Melalui Pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang di dalamnya meliputi :
   a. Kelompok sasaran warga miskin
   b. Program pelatihan yang meliputi :
      1. Lembaga pelatihan
      2. Jenis pelatihan yang diberikan
      3. Instruktur pelatihan
      4. Sarana dan prasarana
      5. Jadwal pelatihan
      6. Metode pelatihan

7. Bantuan dari pemerintah bagi peserta pelatihan
8. Penerapan pelatihan sebagai pekerjaan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program penanganan warga miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, meliputi :
   a. Faktor pendukung
      1. Faktor pendukung internal
      2. Faktor pendukung eksternal
   b. Faktor penghambat
      1. Faktor penghambat internal
      2. Faktor penghambat eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh berbagai sumber data serta informasi terkait masalah yang dibahas, agar memperoleh jawabannya secara detail dan realita. Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian adalah Kota Blitar, alasanya karena peneliti ingin mengetahui penanganan apa saja yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah warga miskin. Kota Blitar memang bukan merupakan kota besar, namun keberadaan warga miskin dari waktu ke waktu semakin bertambah. Lalu penanganan yang seperti apa yang dilakukan terkait warga miskin yang memang dari Kota Blitar sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh berbagai macam data dan informasi dalam membantu menjawab pokok permasalahan yang dibahas dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja beralamat di Jalan Imam Bonjol Kota Blitar yang menjadi situs penelitian yang dituju peneliti. Karena dinas ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang ditujukan untuk menangani masalah warga miskin.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan keterangan dari berbagai informasi, data-data, dokumen, serta informan yang dianggap pasti, artinya data tersebut adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya sesuai dengan penelitian ini. Sugiyono (2008:2) mendefinisikan sumber data sebagai keterangan dari suatu hal, yang dapat berupa sesuatu yang diketahui maupun sesuatu yang telah dianggap ada. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang hanya sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan berasal dari hasil informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, lembaga pelatihan, serta peserta pelatihan itu sendiri. Informasi tersbut diperoleh peneliti karena adanya wawancara, dokumentasi kegiatan. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

b. Drs. Mahendra selaku pemilik BLK Otomotif dan LPK Intermedia Kota Blitar.
c. Bapak Wanto selaku instruktur lukis kaca (grafier) dan pemilik MB Glass Dawuhan Kota Blitar.
d. Bapak Didik selaku instruktur budidaya jamur dan pemilik Warna garden Bendogerit Kota Blitar.
e. Puput selaku peserta pelatihan lukis kaca (grafier).
f. Ibu Wiji Lestari selaku peserta pelatihan budidaya jamur.
g. Bapak Totok selaku peserta pelatihan service hp.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari data-data yang telah diolah oleh pihak atau institusi-institusi yang terkait. Dalam penelitian data sekunder ini meliputi dokumen atau segala arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data skunder yang peneliti peroleh :

a. Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2013.
b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
c. Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengenai warga miskin yang menjadi peserta pelatihan tahun 2013.
d. Buku Blitar Dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik Kota Blitar tahun 2013.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat agar dapat disajikan dalam bentuk penulisan dalam skripsi ini. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan berbagai metode, antara lain :

1. Wawancara (Interview)

   Wawancara menurut Sugiono (2009:317) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam suatu topik tertentu, dan dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang mungkin tidak bisa ditemui saat melakukan observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar guna mengetahui semua informasi tentang program pelatihan bagi warga miskin, selain itu peneliti juga melakukan tanya jawab dengan para instruktur pelatihan Bapak Mahendra, Bapak Didik dan Bapak Wanto serta paserta pelatihan Ibu Wiji, Bapak Totok dan Puput untuk memberikan berbagai informasi dan data-data akurat.

2. Observasi (Pengamatan)

   Observasi menurut Supardi (2006:88) metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diamati.

3. Dokumentasi

   Dokumnetasi menurut Arikunto (2006:158) adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat kabar, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan instrumen penelitian, dimana instrument penelitian menurut Arikunto (1992:150) adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat dan lengkap serta sistematis sehingga lebih mudah diolah. Jenis instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Peneliti sendiri

   Peneliti merupakan instrument yang paling utama dalam melakukan penelitian kualitatif. Karena peneliti sendiri merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, yang menganalisis antara teori-teori yang ada dengan realita di lapangan, sebagai penafsir data hingga melaporkan hasil penelitiannya ke dalam satu laporan penelitian.

2. Melalui Wawancara

   Proses wawancara merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti. Karena disini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada dinas atau orang yang terkait dengan masalah yang dibahas agar memperoleh jawaban yang sesuai dengan kenyataan.

3. Dokumentasi

Hal penting yang perlu dilakukan seorang peneliti selain melakukan wawancara yaitu adalah dokumentasi. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data selain dari teknik wawancara yaitu juga melalui arsip, data, dan dokumen yang ada untuk mendukung penelitian ini.

G. Analisis Data

Ini merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:192) analisis data merupakan suatu proses memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab 2 permasalahan pokok, yaitu :

a. Tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini? dan
b. Seberapa jauh data-data ini dapat menyongkong tema tersebut?

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana menurut Bagdam dan Biklen (Basrowi dan Suwandi 2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2008:247) analisis data kualitatif memiliki alur kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Adalah semua data yang terkumpul dari hasil studi interview, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang munculdari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan ini akan direduksi, dirangkum, dan diseleksi hal-hal pokok, kemudian difokuskan pada hal yang penting, kemudian di cari tema atau polanya. Reduksi data berlangsungsecara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

c. Penyajian data

Merupakan salah satu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Bagian terakhir yang menjadi verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

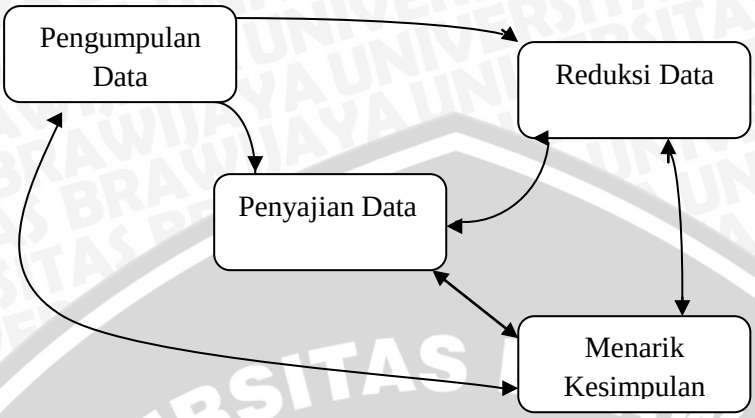

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2008:247)

H. Keabsahan Data

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disebut dengan keabsahan data. Moleong (2008:320-321) berpendapat bahwa keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar ynag dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian Kualitatif diperlukan tekhnik pemeriksaan. Pelaksanaan tekhnik pemeriksaan didasarkan pada 4 kriteria Moleong (2008:324-326) , yaitu :

1. Kepercayaan (*Kredibilitas)*

   Kriteria iniberfungsi untuk :

a. Melaksanakan inkuiri (penyelidikan) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan *(transferability)*

   Sebagai persoalan emperis bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian emperis tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk hal ini peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverivikasi hal tersebut.

3. Ketergantungan *(dependability)*

   Merupakan subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian, ditunjukkan dengan jalan mengadakan replika studi. Jika 2 atau lebih diadakan pengulangan suatu studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang sulit adalah bagaimana mencari kondisi sama dan disamping itu terjadi ketidakpercayaan pada instrumen penelitian. Bisa jadi karena keletihan atau keterbatasan mengingat.

4. Kepastian *(confirmability)*

   Berasal dari konsep ‘objektivitas’ menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektiv atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa penemuan seseorang objektiv apabila disepakati oleh beberapa atau banyak orang. Selain itu menurut Scriven (Moleong 2008:326) unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas, digali dari pengertian bahwa sesuatu itu objektiv berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Blitar

a. Keterangan Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Proklamator, dan Kota PETA (Pembela Tanah Air). Secara legal-formal Kota Blitar didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Level yang dicapai Kota Blitar adalah sebuah kota yang tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Disebut sebagai Kota PETA karena, karena pada tanggal 14 Februari 1945 Laskar PETA dibawah pimpinan Sudanco Suprijadi untuk pertama kalinya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Disebut juga sebagai Kota Proklamator karena Kota Blitar sering dikaitkan dengan Bung Karno yang menceritakan semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan masyarakat. Kota ini juga mendapat julukan Bumi Bung Karno karena disinilah Sang Proklamator disemayamkan. (Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar, 2013)

b. Letak Geografis Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara gegrafis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C - 34°C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dan ibukota Propinsi Surabaya. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. (Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar, 2013)

Gambar 4.2

Peta Administrasi Kota Blitar

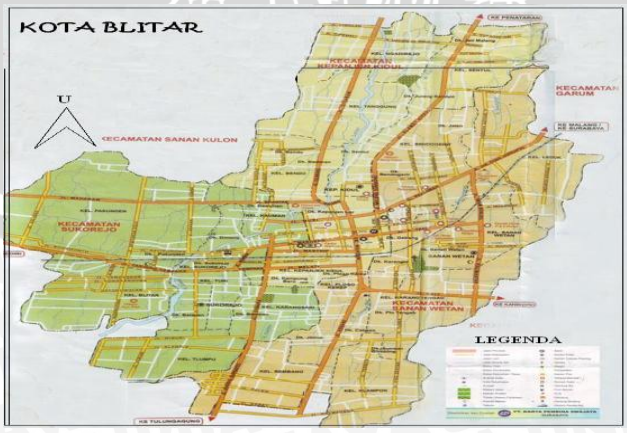

Sumber : www.blitarkota.go.id

Wilayah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, terdiri atas 3 kecamatan dengan 20 kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 dijadikan 21 kelurahan hasil dari pemecahan Kelurahan Pakunden yang menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. Adapun perincian luas wilayah masing-masing kelurahan dan kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km²
2. Kecamatan Kepanjen Kidul dengan luas 10,50 km²
3. Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km²

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Blitar Dirinci Menurut Kelurahan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
1	2	3	4
1.	**Sukorejo**		**9,93**
		1. Tlumpu	1,02
		2. Karangsari	0,88
		3. Turi	0,51
		4. Blitar	1,33
		5. Sukorejo	1,47
		6. Pakunden	2,26
		7. Tanjungsari	2,46
2.	**Kepanjen Kidul**		**10,50**
		1. Kepanjen Kidul	0,87
		2. Kepanjen Lor	0,61
		3. Kauman	0,68
		4. Bendo	1,52
		5. Tanggug	2,23
		6. Sentul	2,68
		7. Ngadirejo	1,91

1	2	3	4
3.	**Sananwetan**		**12,15**
		1. Rembang	0,84
		2. Klampok	1,53
		3. Plosokerep	1,25
		4. Karang Tengah	1,80
		5. Sananwetan	2,13
		6. Bendogerit	1,96
		7. Gedog	2,65
Luas Wilayah Kota Blitar			**32,58**

Sumber : Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar 2013

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam. Kota Blitar sendiri adalah kota yang tidak lepas dari nilai sejarah, nama-nama besar seperti Adipati Aryo Blitar, Proklamator Bung Karno dan Sodanco Suprijadi menjadikan tempat-tempat penuh sejarah seperti Makam Bung Karno, Perpustakaan dan Museum Bung Karno, Istana Gebang, Petilasan Arya Blitar, dan Monumen Suprijadi menjadi salah satu daya tarik pengunjung wisatawan. Dengan begitu Kota Blitar mengendalikan potensi pariwisatanya sebagai penggerak perekonomian. Potensi pariwisata di Kota Blitar sendiri sebenarnya tidak terlepas dari nilai-nilai sejarah yang masih kental seperti Proklamator Bung Karno, dan Adipati Aryo Blitar.

Untuk mendukung iklim yang kondusif selain Kota Blitar memilih sektor pariwisata sebagai primadona untuk mengembangkan ekonomi daerah didukung

juga oleh sistem perdagangan barang dan jasa unggulan. Di Kota Blitar terdapat juga Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) yaitu pusat layanan informasi bagi para pelaku ekonomi, khususnya pelaku perdagangan, selain sebagai pusat layanan informasi tentang pariwisata. Pembangunan pusat informasi ini adalah bentuk realisasi kebijakan pembangunan sarana-prasarana ekonomi pada umumnya, serta sarana-prasarana perdagangan dan pariwisata pada khususnya. Ini adalah penjabaran dari pembangunan sistem perdagangan barang dan jasa unggulan sebagaimana yang tersurat dalam rumusan visi Kota Blitar.

PIPP menjadi media integrasi informasi dan publikasi pariwisata dan potensi daerah secara bersama-sama antara daerah Kota Blitar beserta daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, serta daerah-daerah lainnya di wilayah administrasi Badan Koordinasi Wilayah I Madiun. PIPP diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri bersamaan dengan peresmian beberapa objek lainnya, antara lain Stadion Gelora Supriyadi, Pasar Legi, dan Perpustakaan Persada Bung Karno. (Dokumen Kerja Pemerintah Kota blitar 2013)

Berikut adalah tujuan wisata yang dapat dikunjungi di Kota Blitar:

1. Makam Bung Karno, tempat dimakamkannya presidan pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Sukarno. Makam ini terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, sekitar 2 kilometer sebelah utara pusat kota.

2. Perpustakaan dan Museum Bung Karno merupakan perpustakaan yang selain berisi segala bentuk memorabilia Bung Karno, juga dikembangkan sebagai pusat studi terpadu. Beberapa koleksi yang ada saat ini adalah lukisan hidup Bung Karno yang dapat berdetak tepat pada bagian jantungnya, uang bergambar Bung Karno yang dapat menggulung sendiri, dan koleksi sumbangan dari Yayasan Idayu.
3. Istana Gebang atau lebih dikenal dengan sebutan *Ndalem Gebang*, merupakan rumah tempat tinggal orang tua Bung Karno. Istana ini bertempat di Jl. Sultan Agung 69. Di rumah ini pada setiap bulan Juni ramai didatangi pengunjung, baik dalam rangka peringatan hari ulang tahun Bung Karno maupun karena adanya kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkot Blitar, seperti Grebeg Pancasila.
4. Petilasan Arya Blitar merupakan sebuah makam dari Adipati Arya Blitar yang terletak di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo. Makam ini ramai dikunjungi pada bulan Sura dan juga setiap malam Jumat legi.
5. Monumen Supriyadi merupakan sebuah monumen untuk mengenang jasanya. Pada tahun 1945, Kota Blitar menjadi pusat pemberontakan tentara PETA yang dipimpin oleh Shodancho Suprijadi melawan tentara Jepang. Monumen ini terletak di depan bekas markas PETA dan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya. Selain itu, juga dibangun sebuah patung setengah dada Suprijadi yang terletak di depan Pendapa Rangga Hadinegara.

6. Kebon Rojo, yaitu taman hiburan dan rekreasi keluarga yang berada di belakang kompleks rumah dinas Walikota Blitar yang disediakan untuk masyarakat umum maupun wisatawan secara cuma-cuma. Di taman tersebut, terdapat beberapa jenis hewan peliharaan, fasilitas bermain anak-anak, tempat bersantai, panggung apresiasi seniman, air mancur, dan juga berbagai jenis tanaman langka yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
7. Taman Air Sumberudel adalah taman air paling megah se-eks-Karesidenan Kediri. Taman air ini diresmikan kembali oleh Walikota Blitar pada tanggal 10 Oktober 2007 setelah direnovasi selama kurang lebih satu setengah tahun. Fasilitas yang dimilikinya cukup lengkap bila dibandingkan dengan taman-taman air lain di Jawa Timur. (www.blitarkota.go.id)

c. Sejarah Pemerintah Kota Blitar

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran Team Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 262 tahun 1988 tertanggal 31 Desember 1988, maka berdasarkan dokumen dan testament yang ada, dapatlah diketahui bahwa penetapan Hari Jadi Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Gemeente Blitar dibentuk berdasarkan "*Staatsblad van Nederlandsche Indie*" tahun 1906 Nomor 150 tertanggal 1 April 1906;

2. Jadi tanggal 1 April 1906, merupakan penetapan berdirinya Gemeente Blitar yang dapat dipastikan kebenarannya, bahwa:
   a. Wilayah ibukota (Kabupaten) Blitar, lewat Undang-undang diputuskan menjadi Gemeente (Kotapraja) Blitar.
   b. Gemeente (Kotapraja) Blitar, oleh pemerintah pusat setiap tahun diberikan subsidi sebesar 11,850 golden.
   c. Gemeente (Kotapraja) Blitar, dibebani kewajiban-kewajiban dan diberikan wewenang secara terinci.
   d. Bagi Gemeente (Kotapraja) Blitar, diadakan suatu dewan yang dinamakan "*Dewan Kotapraja Blitar*" dengan jumlah anggota 13 orang.
   e. Undang-undang pembentukan Kotapraja Blitar mulai berlaku tanggal 1 April 1906.

Jika memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan, maka selama perjalanan sejak 1 April 1906 Kota Blitar mengalami perubahan status pemerintahan sebagai berikut :

1. Kota Blitar pertama dibentuk berdasarkan Stbld tahun 1906 nomor 150 jo, Stbld 497 tahun 1928 dengan nama Gemeente Blitar dengan luas wilayah 6,5 Km2 dan jumlah penduduk 35.000 jiwa.
2. Dalam tahun 1928 Kota Blitar pernah menjadi Kota Karesidenan dengan nama "*Residensi Blitar*: dan berdasarkan Stbld nomor 497 tahun 1928 penetapan kembali Gemeente Blitar.

3. Pada jaman Jepang tahun 1942 berdasarkan Osomu Seerai dengan nama "*Blitar-Shi*" dengan luas wilayah 16,1 Km2 dan jumlah penduduk 45.000 jiwa.
4. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1945 dengan nama "*Kota Blitar*" luas wilayah 16,1 Km2 dan jumlah penduduk 45.000 jiwa.
5. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1950 dengan nama Blitar dibentuk sebagai daerah Kota Kecil.
6. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957 dengan nama Kotapraja Blitar, luas wilayah 16,1 Km2 dan jumlah penduduk 60.000 jiwa.
7. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 ditetapkan dengan nama "*Kotamadya Blitar*" dengan luas wilayah 16,1 Km2 dan jumlah penduduk 73.142 jiwa.
8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, luas wilayah Kotamadya Blitar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan dengan 20 kelurahan.
9. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 nama Kotamadya Blitar disesuaikan dan diganti dengan nama Kota Blitar hingga sekarang. (Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar 2013)

d. Arti dan Lambang Kota Blitar

Kota Blitar memiliki Sesanti : " Kridha Hangudi Jaya " Artinya : Semangat Gerak yang timbul dari kita masing - masing untuk berusaha mencari

atau mengupayakan segala sesuatu agar berhasil dengan gemilang, dimaksudkan untuk memberi motivasi dan daya penggerak yang lebih dinamis, lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan, baik dan terarah kepada masyarakat guna berpartisipasi, baik dari sumber dana maupun daya yang ada.

Gambar 4.3

Lambang Kota Blitar

Arti Bentuk Lambang Kota Blitar :

1. Perisai bersudut lima : Pancasila.
2. Bintang emas : Ke-Tuhanan, Kesempurnaan, keluhuran.
3. Pita merah dan putih : Kebangsaan.
4. Gapura dengan tembok batu merah 28 buah (14 di kanan 14 di kiri) : Lambang Sumpah pemuda tanggal 28-10-1928 berdirinya Kota Blitar tanggal 14-2-1906 serta semangat pemberontakan PETA tanggal 14-2-1944.

5. Ganesya : Lambang semangat belajar.
6. Gunung : Lambang jiwa luar dan dinamis.
7. Keris : Lambang Kepahlawanan yang maju terus pantang mundur menghadapi musuh.
8. Padi atau kapas : Kemakmuran atau kesejahteraan.

Arti Penggunaan Warna pada Lambang Kota Blitar :

1. Merah : berani, bersemangat, revolusioner
2. Putih : Suci, bersih
3. Hitam : kuat, sentosa, tahanuji
4. Biru : setia, luas
5. Hijau : harapan, subur
6. Kuning : Luhur dan murni (Doumen Kerja Pemerintah Kota Blitar 2013)

e. Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar

1. Visi Pemerintah Kota Blitar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar ditetapkan sebagai berikut :

"Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera Yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015"

Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
b. Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
c. Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-sehari.

APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. (Doumen Kerja Pemerintah Kota Blitar 2013)

2. Misi Pemerintah Kota Blitar

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan, Misi Kota Blitar periode 2011 – 2015 sebagai berikut :

a. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejewantahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan

kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaaan yang kuat.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan kearah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah, berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik. (Dokumen Kerja Pemerintah Kota Blitar 2013)

2. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai instansi pemerintah tentunya memiliki :

a. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
    a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
    a. Seksi Rehabilitasi Sosial
    b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pengembangan Swadaya Sosial dan Mental Spritual
    a. Seksi Pengembangan Swadaya Sosial
    b. Seksi Mental Spiritual

5. Bidang Tenaga Kerja
    a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    b. Seksi Peningkatan Produktivitas Kerja
    c. Seksi Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
6. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar, sebagai Dinas atau Lembaga Teknis pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Blitar dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah daerah dibidang Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di bidang Sosial dan Tenaga Kerja serta fasilitasi kegiatan.
2. Pelaksanaan pemberian perijinan.
3. Pelaksanaan pengelolaan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan serta fasilitasi kegiatan pembinaan peningkatan swadaya sosiaal dan mental spiritual.

4. Pembinaan dan kerjasama dibidang sosial dan tenaga kerja.
5. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar, terdiri dari 1 (satu) Sekretaris yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta perencanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Bidang Kesejahteraan Sosial

   Mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, klarifikasi, dan inventarisasi perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, bantuan, pengendalian dan penanganan bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsinya:

   a. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial.
   b. Identifikasi, klarifikasi dan inventarisasi perumusan kebijakan penanggulangan masalah sosial.
   c. Pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

d. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
e. Pengaturan, penyelenggaraan kegiatan penanggulangan masalah sosial.

2. Bidang Pengembangan swadaya Sosial dan Mental Spiritual

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, bimbingan koordinasi penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan dan pengendaliaan pelaksanaan peningkatan swadaya sosial dan mental spiritual. Sedangkan fungsinya:

a. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian peningkatan swadaya sosial dan mental spiritual.
b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan swadaya sosial mental spiritual.
c. Pelaksanaan penyelenggaraan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan mental spiritual.

3. Bidang Tenaga Kerja

Memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan fungsinya:

a. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan ketenagakerjaan.
b. Penyelenggaraan dan pembinaan pelatihan tenaga kerja.

c. Pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja.

d. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

c. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki visi yaitu "Terwujudnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar sebagai pilar pelaksanaan APBD Pro Rakyat".

Visi tersebut dimaksud untuk membangkitkan arah dan harapan untuk menumbuhkan kreatifitas bagi setiap aparat lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar agar bekerja lebih baik untuk mencapai kondisi ideal di masa mendatang.

Sedangkan Misi merupakan pernyataan penetapan tujuan suatu organisasi dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dengan ditetapkannya misi, akan membawa organisasi kepada fokus organisasi. Untuk itu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pelayanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan jaringan kerja.
3. Meningkatkan sinkronisasi antara kalangan dunia usaha dengan serikat pekerja semua pihak bagi upaya kesejahteraan tenaga kerja.
4. Menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan pengelolaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana situs pahlawan. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

d. Sasaran

Kelompok Sasaran kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini meliputi:

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Warga Fakir.
5. Warga Miskin.
6. Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
7. Penghuni panti asuhan atau panti jompo.
8. Eks penyandang penyakit sosial.
9. Lanjut usia (Lansia)

10. Taruna Siaga Bencana. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

e. Landasan Hukum

Dalam penyusunan rencana strategis tahun 2011-2015 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. PP Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2011-2015.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Februari Nomor 050/200/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2009. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

f. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh:

1. Sekretaris : 1 orang
2. Kepala bidang : 3 orang

3. Kepala sub bagian : 2 orang
4. Kepala seksi : 7 orang
5. Staf pelaksana (PNS) : 17 orang
6. Staf pelaksana (CPNS) : 1 orang
7. Tenaga fungsional : -- orang

Tenaga Kerja Daerah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kota Blitar ini memiliki jenjang pendidikan yang berbeda, dengan perincian pangkat atau golongan ruang sebagai berikut:

1. Berdasarkan pangkat atau golongan:
   a. Pembina Tk. I/IV.b : 3 orang
   b. Pembina /IVa : 1 orang
   c. Penata Tk. I/III.d : 8 orang
   d. Penata /III.c : 2 orang
   e. Penata Muda Tk. I/III.b : 2 orang
   f. Penata Muda /III.a : 1 orang
   g. Pengatur Tk.I/II.d : 2 orang
   h. Pengatur Muda Tk. I/II.b : 1 orang
   i. Pengatur Muda /II.a : 4 orang
   j. Juru /I.c : 4 orang
   k. Juru Muda /I.a : 1 orang
2. Berdasarkan pendidikan:
   a. S2 : 2 orang
   b. S1 : 9 orang

c. D4 : 2 orang

d. D3 : 3 orang

e. D2 : 1 orang

f. SLTA : 17 orang

g. SMP : 4 orang

h. SD : 1 orang. (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar ini antara lain:

1. Gedung kantor : 2 buah
2. Gedung Loka Bina Karya (LBK) : 1 buah
3. Kendaraan operasional, terdiri dari:
   a. Mobil : 2 unit
   b. Motor : 10 unit
4. Meja kursi dan almari
   a. Meja tamu : 3 stel
   b. Meja kerja : 54 buah
   c. Meja rapat : 20 buah
   d. Almari : 16 buah
   e. Filing kabinet : 10 buah
   f. Kursi : 19 buah

5. Alat tulis
   a. Komputer : 15 buah
   b. Mesin ketik tulis : 9 buah
6. Lain-lain
   a. Tv : 2 buah
   b. Kipas angin : 5 buah
   c. Kamera : 2 buah
   d. AC : 12 buah
   e. Brangkas lemari besi : 1 buah
   f. Brangkas kecil : 1 buah
   g. Pesawat telepon : 10 buah
   h. Mesin rumput : 2 buah (Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2013)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Program Pemerintah Dalam Menangani Warga Miskin Melalui Pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi baik itu daya pikir ataupun daya fisik yang dimiliki oleh seseorang. Hal tersebut menjadi unsur utama dalam kehidupan, kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya menunjukkan bahwa posisi sumber daya manusia (SDM) sangat sentral adanya. Oleh sebab itu sumber daya manusia yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan hidupnya nanti.

Kota Blitar sesuai dengan visinya mensejahterakan masyarakat melalui APBD Pro rakyat dibuktikan dengan bagaimana Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang menjalankan program-program yang telah dibuat. Program pelatihan secara gratis ini tujuannya untuk memberdayakan warga miskin yang tentunya terbatas akan modal, tingkat pendidikan rendah sehingga akses mencari pekerjaan cukup sulit, serta minimnya keahlian yang dimiliki.

Menurut Bapak Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> “Sesuai dengan visi Kota Blitar yang mensejahterakan masyarakat melalui APBD pro rakyat, sehingga dana APBD sebagian digunakan untuk membekali pelatihan bagi warga miskin yang ada di Kota Blitar ini. Artinya Sebagian dana APBD untuk keperluan pembiayaan instruktur, pemberian modal untuk usaha seperti itu. Merka yang minim akan keahlian melalui program ini diberdayakan sehingga memiliki bekal untuk ikut serta bersaing di dunia kerja”. (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar)

Dari data diatas maka sudah cukup jelas bahwa pemerintah Kota Blitar berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui sebagian dana APBD untuk keperluan program pelatihan ini bagi warga miskin ini. Dana tersebut untuk keperluan menyewa instruktur, uang transport serta pemberian modal untuk usaha.

a. Kelompok Sasaran Warga Miskin

Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan visinya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tidak hanya menjadi wacana belaka. Ini terlihat dari upaya pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan taraf kehidupan yang lebih baik dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kota Blitar. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya pelatihan secara gratis untuk setiap warga miskin.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Tujuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sendiri dilihat dari konteks Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini warga miskin termasuk juga, yaitu menjadi suatu lembaga yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti misalnya pemberian pelatihan secara gratis ini". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 WIB di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Sebagai instansi yang membantu pemerintah mengurangi kemiskinan di Kota Blitar melalui pemberian pelatihan gratis untuk warga miskin ini, dimaksudkan agar warga miskin yang identik dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusianya bisa berkembang secara mandiri. Warga miskin

kebanyakan memang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sedangkan di saat ini manusia dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang cukup untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Pelatihan ini pun bisa menjadi peluang bagi warga miskin untuk siap mencari peluang kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Tujuan adanya program pelatihan bagi warga miskin ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tentunya, mengurangi pengangguran. Yang masih usia produktif (18tahun - 45tahun) diberdayakan, agar mereka bisa menigkatkan taraf hidup mereka sendiri nantinya. Karena disini yang kita ambil adalah warga dengan pendapatan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bekerja serabutan. Diberikan pelatihan ini, membuat mereka tahu bidang yang ditekuni seperti apa, bagaimana caranya". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 WIB di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Di Kota Blitar warga miskin tentunya masih ada, begitu juga dengan pengangguran. Meskipun disini mengunggulkan sektor perdagangan dan jasa, hal tersebut tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Hanya mereka yang memiliki modal lebih yang bisa membuka pekerjaan tersebut. Banyak masyarakat usia produktif yaitu antara 18 tahun hingga 45 tahun yang hanya bekerja serabutan, dan memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka tidak bisa berkembang dikarenakan memang tidak memiliki modal untuk membuka usaha serta berpendidikan rendah yang kemudian tidak mampu bersaing di dunia kerja saat ini.

Untuk meminimalisir kemiskinan dan pengangguran ini, program pelatihan secara gratis dirasa sangat tepat bagi warga miskin. Mereka yang

memiliki pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan bisa belajar secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun. Diharapkan bagi warga miskin yang masih usia produktif ini, dan memiliki pekerjaan yang tidak tetap bisa memiliki modal ilmu untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat Puput selaku peserta pelatihan yang mengambil pelatihan kaca lukis (grafier) mengungkapkan :

> "Saya ikut pelatihan ini ya harapanya untuk bisa hidup mandiri, memiliki ilmu yang kemudian ilmu tersebut bisa menghasilkan uang, kalau sudah begitu bisa menguntungkan saya, tentunya bisa memperbaiki nasib saya juga, yang setiap hari hanya serabutan (tukang parkir di pasar) hasilnya hanya cukup untuk makan setiap hari tidak lebih". (wawancara pada tanggal 22 Februari 2014 jam 19.00 WIB di rumah Puput).

Keinginan warga miskin untuk memiliki ketarampilan yang kemudian bisa menghasilkan uang, menjadi pekerjaan yang tetap untuknya, dan tentunya bisa memperbaiki kualitas kehidupannya pun juga sama dengan apa yang menjadi harapan pemerintah. Yaitu memperdayakan warga miskin menjadi seseorang yang mandiri, memiliki keterampilan yang kemudian menghasilkan sehingga di Kota Blitar tidak ada lagi warga yang memiliki keterbatasan akses sosial maupun ekonomi dalam hipdupnya. Sasaran pelatihan ini pun juga harus tepat sasaraan, yaitu warga yang benar-benar miskin dan perlu dilatih.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Tentunya pelatihan ini harus tepat sasaran, jadi warga miskin yang bisa ikut, adalah mereka yang pastinya usia produktif 18-45 tahun, tidak memiliki pekerjaan tetap (serabutan), penghasilanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sumber daya manusianya rendah sehingga akses untuk mencari pekerjaan itu susah, serta tempat tinggal mereka tidak layak huni. Untuk mempermudah hal tersebut kita memberi informasi kepada kelurahan yang kemudian di sampaikan kepada

> RT/RW setempat karena mereka lebih mengerti keadaan langsung warganya, kemudian yang bersangkutan datang langsung ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mendaftar". (wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Dalam pelatihan yang sasaranya pada warga miskin tidak selalu berkaitan dengan pendapatan sehari atau perbulan. Namun lebih kepada keterbatasan ekonomi dan sosialnya, yaitu warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap artinya mereka bekerja tidak tentu setiap harinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan begitu sulit. Akses untuk mendapatkan suatu pekerjaan cukup sulit dikarenakan sumber daya manusianya yang sangat terbatas. Dalam artian mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya keterampilan yang dikuasai. Serta tempat tinggal mereka tidak layak huni. Orang orang yang demikian lah yang kemudian tidak memiliki jaminan untuk masa depan, dikarenakan tidak adanya investasi atau tabungan untuk pendidikan dan keluarganya.

Hal ini yang kemudian harus dipikirkan pemerintah, bagaimana memutuskan mata rantai kemiskinan. Jika kemiskinan pada satu keluarga bisa diatasi maka ini bisa menciptakan keluarga yang sejahtera nantinya. Artinya warga miskin dengan usia produktif antara 18-45 tahun meskipun berpendidikan rendah namun dengan pelatihan yang diberikan secara gratis bisa memperbaiki kualitas hidup, jika saja mereka mau berusaha mengasah keterampilan yang diberikan kemudian membuka usaha dan menghasilkan. Bisa saja keterampilan ini diajarkan kepada anggota keluarga lain, maka tidak hanya satu orang saja yang menguasai.

Agar program ini tepat sasaran yaitu dikhususkan bagi warga miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibantu oleh Kelurahan melalui RT dan RW setempat mendata warga miskin yang ingin mengikuti program pelatihan tersebut. Karena memang RT dan RW setempat yang mengetahui kondisi warga sebenarnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ibu Wiji Lestari selaku peserta pelatihan budidaya jamur mengungkapkan :

> "Pak RT memberitahu saya kalau ada pelatihan gratis yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, kalau saya mau, saya disuruh datang ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerjanya langsung untuk mengisi formulir bersama dengan kebetulan tetangga yang ikut beliau satu kelurahan dengan saya. Karena saya hanya meracang (jualan jajan kecil-kecilan dirumah) ya saya berniat ikut. Buat nambah pengalaman saya. Siapa tahu nanti bisa nambah penghasilan saya setiap harinya". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 Jam 11.00 WIB di rumah Ibu Wiji Lestari).

RT dan RW setempat yang mengetahui persis kondisi warganya berkewajban untuk memberikan informasi kepada warga miskin di daerahnya perihal program pelatihan gratis yang diberikan pemerintah. Dan bagi warga yang berminat disarankan untuk datang langsung ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mengisi formulir tanda menyetujui sebagai peserta pelatihan. Berikut adalah daftar nama peserta pelatihan bagi warga miskin.

TABEL 4.2

DAFTAR NAMA WARGA MISKIN PESERTA PELATIHAN

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

TAHUN 2013

NO.	NAMA	TAHUN LAHIR	ALAMAT	JENIS PELATIHAN	KETERANGAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Rudjito	1959	Jl. Enggano No. 2 RT. 03/RW. 01 Kel/Kec Sananwetan	Gravier/Art Glass	Ketua II
2.	Yulis Efendi	1988	Jl. Legundi RT. 2/RW. 01 Kel/Kec Sananwetan	Gravier/Art Glass	
3.	Wuji Priyono	1968	Jl. Enggano gg. II RT. 2/RW. 01 Kel/Kec Sananwetan	Gravier/Art Glass	
4.	Muji Utomo	1971	Jl. Legundi No. 31 Rt. 5/RW. 1 Kel/Kec Sananwetan	Gravier/Art Glass	
5.	Noni Darmawan	1981	Jl. Legundi No. 34 Rt. 2/RW.1 Kel/Kec Sananwetan	Gravier/Art Glass	
6.	Agus Budi Priyo Prasetyo	1971	Jl. Kacapiring No. 28 Rt. 1/ Rw. 3 Kel/Kec Kepanjen Kidul	Gravier/Art Glass	Ketua II

1	2	3	4	5	6
7.	Gatot Guyana	1971	Jl. Kacapiring No. 28 RT.2/RW.3 Kel/Kec. Kepanjen Kidul	Gravier/Art Glass	
8.	Basuki	1968	Jl. Kacapiring No. 7 RT.1/RW.3 Kel/Kec. Kepanjen Kidul	Gravier/Art Glass	
9.	Edi Santoso	1978	Jl. Arumdalu No. 3 RT. 3/RW. 3 Kel/Kec. Kepanjen Kidul	Gravier/Art Glass	
10.	Puput	1987	Jl. Kacapiring RT. 3/RW. 3 Kel/Kec. Kepanjen Kidul	Gravier/Art Glass	
11.	Marwo	1967	Jl. Trowulan RT. 3/RW. 6 Kel. Sentul Kec. Kepanjen Kidul	Budidaya Jamur Tiram	Ketua I
12.	Sampu Santoso	1977	Jl. Kaliporon RT. 1/RW.5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	
13.	Wiji Lestari	1970	Jl. Asahan Gg. 3 No. 18 RT. 3/RW. 5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	

1	2	3	4	5	6
14.	Ahmad Sirojul	1993	Jl. Asahan Gg. 3 RT. 3/ RW. 5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	
15.	Muhtar Elliyan	1986	Jl. Ciliwung No. 96 RT. 3/ RW. 4 Kel. Bendo Kec. Kepanjen Kidul	Budidaya Jamur Tiram	Ketua II
16.	Agus Santoso	1974	Jl. Asahan Gg. 3 No. 35 RT.3/RW.5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	
17.	Andri Kurniawan	1990	Jl. Asahan Gg. II No. 25 RT. 3/ RW.5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	
18.	Henik Candra Kasiati	1982	Jl. Asahan Gg. II No. 3 RT.3/RW.5 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo	Budidaya Jamur Tiram	
19.	Totok Subagyo		Jl. Pandan Barat No. 26B RT. 2/RW.6 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	Ketua I

1	2	3	4	5	6
20.	Untung Jokowi dodo		Jl. Pandan Barat No. 26 RT. 2/RW.6 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	
21.	Irawan Budion o		Jl. Pandan Barat No. 64 RT. 2/RW.6 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	
22.	Nurwiji anto		Jl. Wilis Gg. IV No. 14 RT.2/RW.5 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	
23.	Erwant o		Jl. Wilis Gg. IV No. 14 RT. 2/RW.5 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	
24.	Lulut Pancari yadi		Jl. Imam Bonjol No. 75 RT.1/RW.6 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan	Service HP	Ketua II

1	2	3	4	5	6
25.	Edi Waluyo		Jl. Sisingamangaraja RT. 3/RW.6 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan	Service HP	
26.	Nonok Sumedi		Jl. Imam Bonjol Gg.IV RT.3/RW.6 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan	Service HP	
27.	Samsun Yunawa		Jl. Kyai Mojo No. 4 RT.2/RW.6 Kel. Sanawetan Kec.Sananwetan	Service HP	
28.	Chandra Gupta		Jl. Barito Selatan I No. 2 RT.1/RW.7 Kel. Kauman Kec. Kepanjen Kidul	Service HP	

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terdapat 3 jenis pelatihan. Dimana peserta pelatihan yaitu warga miskin memang rata-rata masih usia produktif yaitu antara 18 hingga 45 tahun. Pelatihan secara gratis ini juga lebih banyak diminati oleh laki-laki, hanya beberapa untuk peserta perempuan. Seperti yang diungkapkan

oleh Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar :

> "Pada Tahun 2013 ini memang peminatnya kebanyakan adalah laki-laki karena memang tahun 2013 ini untuk pelatihannya sendiri service hp, grafier (kaca lukis) yang memang seperti ini banyak diminati laki-laki. Hanya budidaya jamur saja yang bisa diminati oleh perempuan. Tetapi banyak yang hanya sekedar minat saja tapi bakatnya tidak pada bidang tersebut". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 Jam 10.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Dalam pelaksanaanya, pelatihan ini memang banyak diminati oleh laki-laki yang tentunya mereka dalam usia produktif yaitu usia kerja antara 18 hingga 45 tahun. Meskipun jenis pelatihan hanya 3 untuk warga miskin pada tahun 2013 tetapi tentunya keterampilan ini memiliki prospek kerja yang bagus. Sehingga diharapkan peserta pelatihan yaitu warga miskin mampu bersaing dan mandiri dengan membuka usaha sendiri.

b. Program Pelatihan

Peningkatan keterampilan (*skill*) pada seseorang untuk mendorong kemandirian merupakan bagian penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tanpa mengesampingkan program yang telah dibuat oleh pemerintah seperti halnya program pelatihan yang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bertumpu pada pemberian keterampilan tentunya menjadi upaya untuk memberdayakan dan menciptakan kemandirian masyarakat akan sangat berarti untuk mengurangi kemiskinan.

Kota Blitar memang tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya merupakan wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdaganggan, layanan publik, sawah dan pekarangan. Oleh karena itu sebagai

penggerak perekonomian sektor pariwisata menjadi primadona di Kota Blitar, untuk mendukung iklim yang kondusif perdagangan dan jasa menjadi sektor pendukung. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ini tentunya bergerak pada sektor perdagangan dan jasa untuk bisa menunjang sektor pariwisata Kota Blitar. Dalam pelaksanaan pelatihan secara gratis kepada warga miskin ini tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya adalah :

b.1 Lembaga pelatihan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan instansi pemerintah yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk warga miskin yang memiliki kesejahteraan kurang cukup dikarenakan keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelatihan meskipun penyusunan program dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemberian pelatihan ini dilakukan di luar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu sendiri. Bekerja sama dengan lembaga lain yang lebih fokus dalam satu bidang pelatihan akan menjadikan pelatihan tersebut lebih baik.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Untuk pemberian pelatihan, tidak dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini, kita kerjasama dengan pihak luar dalam memberikan pelatihan. Lembaga pelatihan di luar dirasa lebih baik karena tersedia instruktur yang profesional dengan alat-alat yang sudah lengkap tersedia di tempat pelatihan sehingga mereka (fakir miskin sebagai peserta pelatihan) datang langsung ke tempat pelatihan seperti sekolah" (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 10.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Menjalin kemitraan dengan lembaga lain dalam memberikan pelatihan dinilai lebih efektif dan efisien karena tersedia instruktur yang profesional dengan alat-alat yang lengkap tersedia serta tempat pelatihan yang nyaman dan lebih khusus sesuai dengan bidang pelatihan. Warga miskin yang mengikuti pelatihan datang langsung ke tempat pelatihan untuk memperoleh pembekalan materi maupun praktek secara langsung. Pak Totok selaku peserta pelatihan service hp mengungkapkan :

> "Tempat pelatihan kita bukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, tapi di BLK otomotif dan LPK Inter Media Kota Blitar daerah Jalan Cemara, disana sudah ada instruktur dan alat-alat pelatihan. Pelatihannya dalam ruangan seperti ruang kelas" (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 Jam 13.00 WIB di rumah Pak Totok).

Lembaga tersebut didirikan untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang memang berkeinginan memiliki keterampilan di luar pendidikan formal. Bertujuan sebagai lembaga pelatihan kerja yang mencetak tenaga yang mandiri dan profesional serta berdaya saing agar mampu mencari maupun membuka lapangan pekerjaan sendiri. Membantu mempersiapkan seseorang dalam menghadapi tantagan dan tuntutan padaa saat ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Drs. Mahendra selaku pemilik BLK Otomotif dan LPK Intermedia Kota Blitar yang mengungkapkan :

> "Lembaga pelatihan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang tidak hanya puas dengan pendidikan formal saja. Keinginan mereka untuk memiliki keterampilan agar mampu mencari dan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mudah. Untuk masalah kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam memberikan pelatihan kita terima karena memang lembaga ini sudah berdiri lama dan memang sudah ada tenaga-tenaga terampil yang selalu siap membimbing sesuai dengan bidang yang diambil, kebetulan untuk kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2013 di lembaga pelatihan ini adalah service hp. Disini peserta pelatihan tidak dipungut biaya sama sekali, hanya datang

> dan mengikuti pelatihan. Semua biaya pelatihan ditanggung oleh pemerintah". (hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2014 jam 16.00 WIB di BLK Otomotif dan LPK Inter Media Kota Blitar).

Kerjasama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dengan lembaga pelatihan dalam memberdayakan warga miskin mampu mengurangi kemiskinan di Kota Blitar. Melalui instruktur yang sudah berpengalaman, adanya tempat pelatihan serta tanggunggan biaya yang tidak dibebankan kepada peserta pelatihan warga miskin dalam hal ini, melainkan dibiayai oleh pemerintah diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang mandiri, kompeten guna mendukung perluasan lapangan kerja dan dapat berwirausaha sendiri. Sehingga warga miskin yang terbatas akan pendidikan formal bisa memiliki keterampilan sesuai dengan pelatihan yang diikuti.

b.2 Jenis pelatihan yang diberikan

Pelatihan yang diberikan terdiri dari beberapa jenis, tentunya pelatihan-pelatihan yang diberikan ini bisa menjadi prospek kerja yang bagus nantinya. Mempunyai nilai usaha yang bagus sehingga menciptakan kemandirian seseorang dalam mengembangkan potensinya dan menghsilkan. Pemberian pelatihan ini juga dilihat dari sisi modal pengembangan usaha, tidak banyak modal yang harus digunakan nantinya mengingat peserta pelatihan adalah warga miskin yang terbatas akan biaya.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Jenis pelatihan yang diberikan sebenarnya banyak sekali. Kita putar, jadi orang-orang yang termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis pelatihan berbeda beda setia tahun. Seperti untuk warga miskin ini untuk tahun 2013 ada 3 jenis pelatihan, yaitu lukis kaca (grafier)

> oleh Bapak Wanto (MB Glass), kemudian ada budidaya jamur oleh Bapak Didik (Wana Garden), dan yang terakhir ada service hp oleh Bapak Mahendra (BLK Otomotif dan LPK Intermedia). Kalau tahun-tahun sebelum 2013 dulu itu ada pelatihan menjahit, bengkel masih banyak lagi, tapi selalu kita putar tiap tahunnya". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Untuk tahun 2013 jenis pelatihan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk warga miskin ada 3 yaitu pelatihan melukis kaca, budidaya jamur dan service hp. Pengembangan usahanya memang cukup mudah dan tidak terlalu menggunakan banyak modal. Dilihat dari prospek kedepan 3 jenis pelatihan ini memang memiliki potensi jika dikembangkan di wilayah Kota Blitar. Mengingat sektor pariwisata adalah sektor unggulan di Kota Blitar yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa.

b.3 Instruktur pelatihan

Pada dasarnya instruktur pelatihan mengikuti lembaga yang ditunjuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai mitra kerja dalam memberikan pelatihan. Tidak hanya melihat lembaganya saja, tetapi juga melihat instruktur yang mengajar pada lembaga tersebut, diharapkan tidak hanya sekedar memberikan pelatihan saja, tetapi menciptakan susasana pelatihan yang kondusif dan juga memberikan motivasi peserta pelatihan. Mengingat bahwa peserta pelatihan adalah warga miskin, kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga daya tangkap ilmu juga sedikit sulit dan juga rasa minder atau kurang percaya diri.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Sebenarnya tidak ada kriteria khusus untuk instruktur pada lembaga yang kami tunjuk untuk diajak kerjasama dalam memberikan pelatihan ini. Yang pasti instruktur bisa diajak kerjasama, berpengalaman, bonafit, profesional dan yang paling penting adalah cocok untuk melatih orang-orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk warga miskin ini. Karena kalau yang ditunjuk lembaga yang terlalu bagus tentunya instrukturnya juga bagus nanti malah tidak cocok melatih mereka (warga miskin)". (hasil wawancara tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Instruktur yang dipilih yaitu instruktur yang sudah berpengalaman, memiliki keahlian yang kompeten dalam memberikan pengarahan, menguasai materi pelatihan, mampu menjaga situasi pelatihan agar tetap dalam keadaan yang menunjang pencapaian tujuan pelatihan. Serta yang terpenting adalah cocok dalam melatih warga miskin. Artinya disini mengerti kondisi warga miskin yang serba terbatas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Wanto selaku instruktur pelatihan melukis kaca (garfier) mengungkapkan :

> "Dalam melatih mereka (warga miskin) tentunya harus sabar, menjadikan mereka seperti keluarga, memberikan bimbingan juga satu-satu agar mereka merasa dekat dengan kita. Karena yang saya lihat, mereka (warga miskin) ini ada beberapa yang memang benar-benar berniat mengikuti pelatihan ini, ada juga yang hanya sekedar ikut ikutan saja, ada yang cepat tangkap diberikan materi ada juga yang susah, bermacam macam tipe". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 jam 11.00 WIB di rumah Bapak Wanto).

Pelatihan ini memang tidak dipungut biaya sama sekali, sehigga beberapa dari peserta pelatihan ada yang benar-benar berniat mengikuti pelatihan, tapi ada juga yang hanya sekedar ikut saja harapanya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebanyakan dari peserta pelatihan memilki pendidikan yang rendah sehingga dalam menangkap materi sedikit sulit. Oleh karena itu menciptakan rasa kekeluargaan di tempat pelatihan memang sangat penting. Hal ini untuk

membentuk suasana yang nyaman bagi peserta pelatihan itu sendiri. Puput selaku peserta pelatihan kaca lukis (grafier) mengungkapkan :

> "Yang memberi pelatihan enak orangnya, mau diajak membangun. Selain itu beliau juga dekat dengan kita-kita (peserta pelatihan kaca lukis), istilahnya mengajari satu-satu. Jadi kita paham dan tidak malu kalau mau tanya-tanya hal yang belum dipahami". (hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 jam 19.00 WIB di rumah Puput).

Instruktur pelatihan merupakan faktor terpenting dalam berjalannya pelatihan tersebut. Tentunya juga sedikit banyak menjamin keberhasilan program pemerintah melalui pelatihan secara gratis ini, dimana pemberdayaan warga miskin dilakukan melalui pelatihan ini. Yang sebelumnya tidak mengerti sama sekali, disini warga miskin belajar untuk mengerti dan memahami satu keterampilan melalui intruktur-instruktur yang telah berpengalaman. Pembekalan keterampilan lewat pelatihan ini diharapkan mampu membantu warga miskin dengan segala keterbatasannya untuk bisa bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan peluang usaha sendiri.

b.4 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan perlengkapan maupun segala fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelatihan. Sarana dan prasarana ini tidak tersedia di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, melainkan di lembaga pelatihan masing-masing. Dalam menunjuk lembaga pelatihan tentunya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar memilih lembaga yang bagus dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan menunjang pelatihan tersebut demi tercapainya tujuan program yang telah dibuat pemerintah. Bapak S.

Rohana Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Mengenai sarana dan prasarana, kita sebelumnya menunjuk lembaga yang memang sudah memiliki nama di Kota Blitar, meskipun lembaga tersebut bukan lembaga yang di nilai sangat bagus namun lembaga ini menurut kami sangat cocok untuk melatih warga miskin. Tentunya lembaga ini kami nilai sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 11.00 di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai instansi yang bertanggung jawab atas program ini tentunya lebih selektif dalam memilih lembaga pelatihan yang di dalamnya menjamin kualitas instruktur serta kelengkapan segala sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pelatihan memang dirasa sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pelatihan merupakan kegiatan komunikasi yang intinya adalah pertukaran atau penyampaian pesan dan ilmu kepada peserta pelatihan baik itu melalui komunikasi ataupun melalui media pendukung. Sehingga kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelatihan sangat mendukung keberhasilan program ini. Bapak Didik selaku instruktur pelatihan budidaya jamur mengungkapkan :

> "InsyaAllah sarana dan prasarana dalam lembaga kami sudah lengkap dan memadai, tapi khusus dalam pelatihan budidaya jamur yang disasarkan kepada warga miskin ini kita lebih mengoptimalkan peralatan yang sesederhana mungkin. Karena disini yang dilatih berbeda, yaitu kelompok sasaran warga miskin yang kebanyakan agak sulit menerima materi. Tapi tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana tidak lengkap dan memadai. Hal ini hanya bertujuan agar mereka dalam menggunakan, mencoba menerapkan, maupun praktek itu mudah tidak mengalami kesulitan". (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 jam 20.00 WIB di rumah Bapak Didik).

Meskipun sarana dan prasarana dirasa sudah lengkap dan memadai tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan. Seperti kelompok sasaran warga miskin ini yang serba terbatas sehingga dalam menerima materi sedikit susah tidak terbiasa menggunakan alat-alat modern. Diperlukan sarana dan prasarana yang sesederhana mungkin, karena nantinya bantuan alat yang diberikan oleh pemerintah juga bersifat sederhana. Ini nantinya juga memudahkan mereka (warga miskin) dalam penggunaanya. Bapak Totok selaku peserta pelatihan service hp mengungkapkan :

> "Mengenai sarana dan prasana di tempat pelatihan sudah cukup memadai menurut saya. Semuanya lengkap, tapi untuk service hp sendiri menggunakan komputer sebagai media pengajaran. Tapi kebutulan saat pelatihan disana komputer yang digunakan gampang sekali *error* hal ini tentunya mengganggu dan menghambat proses pelatihan". (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 jam 13.00 WIB di rumah Bapak Totok).

Tidak hanya kelengkapan sarana dan prasarana saja yang harus diperhatikan untuk menunjang keberhasilan program dari pemerintah ini. Akan tetapi kelayakan dan kondisi sarana dan prasarana yang masih bagus juga diperlukan dalam menunjang kelancaran proses pelatihan ini. Sehingga untuk jangka panjang dan mengikuti perkembangan waktu kedepan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi peralatan rusak yang menghambat jalannya proses pelatihan tersebut.

b.5 Jadwal Pelatihan

Jadwal pelatihan merupakan dimana waktu warga miskin melakukan pelatihan. Mungkin sedikit seperti melakukan pendidikan formal, mereka (warga

miskin) yang mendaftarkan diri mengikuti pelatihan untuk beberapa hari kedepan diharuskan datang ke lembaga pelatihan untuk memperoleh beberapa materi dilanjutkan dengan praktek sesuai dengan jenis pelatihan yang telah dipilih. Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Untuk jadwal pelatihanya sendiri 3 jenis pelatihan antaranya budidaya jamur, pelatihan lukis kaca (grafier), kemudian service hp berbeda beda. Untuk penepatan jamnya, mereka (warga miskin) koordinasi sendiri dengan instruktur. Tapi kalau masalah berapa lamanya pelatihan itu kita yang menentukan. Untuk pelatihan lukis kaca (grafier) itu selama 24 hari, service hp selama 10 hari dan untuk budidaya jamur sendiri selama 7 hari saja, ini tidak sama karena dilihat dari tingkat kesulitan jenis pelatihan". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Lama pelatihan tergantung pada tingkat kesulitan jenis pelatihan yang diambil. Karena antara budidaya jamur, lukis kaca (grafier) serta service hp memilki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ini juga bertujuan agar pelatihan yang diberikan bisa maksimal, memberikan materi dan praktik dari mulai tidak bisa hingga peserta pelatihan mengerti, paham dan mampu menerapkannya melalui praktek langsung. Bapak Wanto selaku instruktur lukis kaca (grafier) mengungkapkan :

> "Pelatihan lukis kaca ini selama 24 hari. Dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai jam 08.00 pagi samapi jam 12.00 siang. Tapi kadang juga lebih karena dalam satu pertemuan itu harus menghabiskan 1 materi. Pelatihan lukis kaca (grafier) ini lama karena mulai dari pengenalan bahan, pemotongan kaca itu sendiri, penggambaran kaca hingga pengecatan, dan harus menunggu cat hingga kering. Setelah itu masih harus dihias". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 jam 11.00 WIB di rumah Bapak Wanto).

Pelatihan lukis kaca ini selama 24 hari dilakukan mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Untuk mempermudah proses pembelajaran setiap instruktur menyiapkan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Pelatihan ini jauh beda dengan pendidikan formal yang ada. Hanya kondisinya yang berbeda, kalau pelatihan ini bersifat lebih santai dan tidak formal, namun untuk pengajarannya sendiri tidak jauh berbeda. Bapak Totok selaku instruktur budidaya jamur mengungkapkan :

> "Untuk pelatihan budidaya jamur sendiri hanya selama 7 hari saja. Mulai hari Senin hingga Sabtu dari jam 07.00 sampai jam 14.00. Sebenarnya ini tidak cukup kalau harus di mulai dari awal penanaman bibit hingga tumbuh jamur, membutuhkan beberapa minggu. Tapi karena dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja waktu yang disediakan hanya 10 hari saja. Jadi kita membagi waktu 7 hari itu mulai dari pengenalan alat dan bahan hingga pengambilan jamur yang siap jual harus pas waktunya. Jadi kita bigin begini, karena tempat kita bukan hanya untuk pelatihan saja tapi karena memang untuk budidaya jamur yang siap jual, kita sistem sehari untuk pengenalan bahan dan alat, selanjutnya penanaman bibit dan lain sebagainya hingga pengambilan kita ajak ketempat tempat sesuai dengan urutan budidaya jamur. Hal ini lebih efektif meskipun hanya 7 hari pelatihan tapi mereka tetap mengerti urutan dan mempraktekannya secara langsung budidaya jamur ini. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 jam 20.00 WIB di rumah Bapak Didik).

Lama pelatihan memang ditentukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, tapi sebagai lembaga pelatihan dan instruktur yang telah berpengalaman memberikan pelatihan tentunya harus membagi waktu yang singkat tersebut dengan pelatihan yang bermanfaat. Tidak harus melakukan pelatihan hingga awal dan mempraktekkan urutan yang sebenarnya, tapi bisa juga dilakukan secara singkat saja, tapi tetap sesuai dengan urutan budidaya (dalam hal ini mengenai budidaya jamur). Mengingat budidaya jamur ini pastinya

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus memulai proses pembibitan hingga tumbuhnya jamur yang siap dijual.

Setiap jenis pelatihan memiliki jangka waktu yang berbeda beda untuk sampai mengerti, memahami hingga sanggup untuk mempraktekkan secara langsung. Tapi meskipun dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin tentunya sudah ada perhitungan dan pertimbangan dari instruktur pelatihan. Instruktur yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar pastinya instruktur yang bertanggung jawab sehingga sanggup dalam melatih warga miskin dari mulai tidak mengerti sama sekali hingga bisa mempraktekkan secara langsung. Bapak Drs. Mahendra selaku pemiilik BLK Otomotif dan LPK Intermedia media mengungkapkan :

> "Pelatihan service hp sendiri selama 10 hari, pelatihan dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu, hanya 3 jam saja dalam sehari pelatihan dari pukul 08.00-11.00. Meskipun waktunya cukup singkat tapi kita melatih para warga miskin tersebut hingga bisa. Kita juga menyuruh mereka membawa hp yang sudah rusak atau tidak bisa dipergunakan. Milik sendiri, saudara atau tetangga. Kemudian di tempat pelatihan untuk prakteknya secara langsung mereka (warga miskin) memperbaiki hp rusak yang dibawanya dari rumah". (hasil wawancara tanggal 27 Februari 2014 jam 16.00 WIB di BLK Otomotif dan LPK Intermedia).

Program pemerintah ini memang harus didukung sepenuhnya, karena membantu mengentaskan kemiskinan di kota Blitar. Begitu juga dengan instruktur-instruktur pelatihan yang harus memilki pemikiran bahwasannya mereka memberikan pelatihan selain karena menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan mereka menjadi seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan walaupun dalam waktu yang sesingkat mungkin. Usaha para instruktur untuk membagi waktu agar

semua materi dapat disampaikan dan praktek langsung bisa dilakukan dinilai sangat berguna dalam menunjang keberhasilan program dari pemerintah ini.

TABEL 4.3

JADWAL PELATIHAN BAGI WARGA MISKIN

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

SEPTEMBER TAHUN 2013

Jenis Pelatihan	Lama Pelatihan	Hari	Waktu
Budidaya Jamur	7 hari	Senin – Sabtu	07.00 – 14.00
Lukis Kaca (grafier)	24 hari	Senin – Sabtu	08.00 – 12.00
Service Hp	10 hari	Senin – Sabtu	08.00 – 11.00

Sumber : Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2013

Pengaturan jadwal pelatihan memang sangat penting karena membantu lembaga pelatihan dalam mengatur antara jadwal dengan kesesuain materi yang akan diberikan oleh instruktur pelatihan. Adanya patokan lamanya pelatihan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengharuskan lembaga pelatihan bersama dengan instrukturnya mengatur waktu yang sesingkat itu menjadikan pelatihan itu berjalan semaksimal munkin. Proses dalam mengatur jadwal pelatihan dimulai dengan mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan dan telah ditentukan.

Menentukan prioritas kegiatan, maksutnya kegiatan yang dirasa sangat penting, perlu, dan mendesak dan menuntut perhatian lebih tentunya perlu

diutamakan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar waktu yang tersedia sesingkat itu bisa digunakan secara maksimal, menyampingkan hal-hal yang kiranya tidak perlu dilakukan dan dirasa semua peserta pelatihan bisa melakukannya di luar kegiatan pelatihan. Namun tetap, dalam proses pelatihan berusaha untuk fleksibel itu diperlukan, karena akan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di luar rencana. Penambahan waktu dalam pelatihan biasa dilakukan oleh para instruktur apabila memang dalam pelatihan materi yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang tersedia.

b.6 Metode pelatihan

Dalam memberikan pelatihan tentunya para instruktur pelatihan tidak sekedar memberikan materi saja kemudian mengharuskan mereka praktek secara langsung. Menggunakan beberapa cara atau metode dalam proses pelatihan dapat membantu memudahkan peserta pelatihan dalam memahami objek yang menjadi sasaran ilmu sesuai dengan jenis pelatihan yang telah dipilih. Karena disini yang dialatih adalah mereka warga miskin yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan mayoritas dari mereka berpendidikan rendah maka instruktur pelatihan harus bisa menggunakan metode yang sesederhana mungkin dan paling cocok untuk melatih warga miskin, penggunaan metode yang cocok ini mempermudah peserta pelatihan dalam menerima materi.

Menurut Bapak Wanto selaku instruktur lukis kaca (grafier) mengungkapkan :

> “Untuk metode dalam pelatihan, saya cukup sederhana saja. Tidak perlu yang rumit-rumit, nanti kalau rumit mereka (warga miskin) akan kesulitan memahami materi dari saya. Jadi untuk awal pelatihan cukup dengan

> pengenalan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam lukis kaca (grafier) ini. Ini cukup sehari saja, selanjutnya sambil jalan mereka (warga miskin) praktek secara langsung. Saya kira dengan seperti ini akan lebih mudah mereka (warga miskin) memahami materi yang saya berikan. Tidak hanya itu saja hasil dari yang mereka buat beberapa kaca lukis bisa dibawa pulang entah itu mau dijual atau mau disimpan sendiri. Hasil dari yang mereka (warga miskin) buat itu bisa menjadi penilaian akan kepahaman materi yang diterima". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 jam 100.00 WIB di rumah Bapak Wanto).

Pada dasarnya metode yang digunakan oleh instruktur pelatihan sangat baik dalam proses pelatihan, dimana instruktur menekankan praktek secara langsung agar peserta pelatihan lebih bisa memahami dan mampu menguasai apa yang telah diajarkan oleh instruktur. Pengenalan alat dan bahan tidak terlalu sulit, sehingga cukup membutuhkan waktu yang singkat. Ini berlaku di semua jenis pelatihan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibu Wiji selaku peserta pelatihan budidaya jamur yang mengungkapkan :

> "Dalam pelatihan budidaya jamur ini materi lebih sedikit, kita lebih banyak prakteknya. Kira-kira antara 20% materi dan 80% praktek. Pada waktu itu ketika kita pertama pelatihan hanya satu hari digunakan untuk pengenalan alat dan bahan, hari-hari selanjutnya kita langsung praktek ya mulai praktek ". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 jam 12.00 WIB di rumah Ibu Wiji Lestari).

Metode dengan banyak melakukan praktek daripada materi akan lebih cepat dipahami peserta pelatihan. Materi hanya cukup menerangkan seacara garis besar jenis pelatihan yang di pilih. Mulai dari penjelasan alat dan bahan apa saja yang diperlukan, proses pembuatannya, hingga prospek pemasaran produk atau jasa yang telah dibuat dan dipelajari. Praktek secara langsung merupakan upaya untuk memberi kesempatan kepada para peserta untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Metode seperti ini akan lebih mudah diingat oleh peserta

pelatihan daripada harus pasif menerima materi dari pelatih. Bapak Totok selaku peserta pelatihan service hp mengungkapkan :

> "Kalau untuk metode service hp ya hari pertama tentunya pengenalan terlebih dahulu tentang alat-alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya kita praktek secara langsung. Disuruh membawa hp yang rusak entah milik sendiri, saudara, atau tetangga mulai dari hp model lama dan hp model baru. Setiap hari selama 10 hari itu kita praktek langsung membenahi hp yang rusak tersebut, awalnya susah tapi lama-kelamaan jadi mudah ternyata kalau sekedar membenahi hp model lama seperti kena air". (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 jam 13.00 WIB di rumah Bapak Totok).

Pada intinya ketiga pelatihan mulai dari budidaya jamur, service hp, hingga lukis kaca (grafier) metode yang digunakan pelatih adalah sama. Yaitu antara 20% materi dan 80% praktek secara langsung. Pemilihan metode yang tepat meskipun sederhana, artinya dalam penyampaian materi ataupun praktek tidak menggunakan media yang dirasa sulit digunakan oleh peserta pelatihan (warga miskin). Instruktur pelatihan disini tidak hanya sekedar melatih tapi memahami kondisi peserta pelatihan (warga miskin) yang serba keterbatasan.

b.7 Bantuan dari pemerintah bagi peserta pelatihan

Pelatihan bagi warga miskin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dilaksanakan dengan menjalin mitra kerjasama melalui lembaga pelatihan di luar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tanpa dipungut biaya ini juga didukung oleh adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu disaat pelatihan ataupun sesudah pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Masalah biaya transport, ataupun uang makan, dan juga alat-alat yang nantinya juga bisa menjadi milik sendiri untuk pengembangan

usaha, tentunya menjadi harapan peserta pelatihan (warga miskin) ini. Sehingga pemerintah dalam program pelatihan ini memberikan bantuan berupa :

a. Uang transport

b. Snack dan makan

c. Bantuan alat-alat pelatihan

Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Ada bantuan untuk peserta pelatihan (warga miskin) ini, yaitu berupa uang transport sebesar Rp. 30.000/hari tapi karena dipotong pajak menjadi Rp. 28.000/hari selama pelatihan berlangsung. Kemudian mereka mendapat makan dan snack di tempat pelatihan masing-masing. Mereka juga mendapat bantuan alat-alat yang sifatnya kelompok. Jadi dalam pelatihan ini mereka dibentuk menjadi beberapa kelompok yang 1 kelompok beranggotakan 5 orang. Nah untuk bantuannya itu per 1 set alat-alat lengkap diberikan kepada 1 kelompok yang beranggotakan 5 orang tersebut". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 11.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah tentunya sangat berguna bagi peserta pelatihan. Peserta pelatihan yang bekerja serabutan tidak tentu setiap hari meskipun sudah mengikuti pelatihan dan tidak bekerja dalam sehari tetapi tetap ada uang pengganti istilahnya dengan uang transport. Tidak hanya itu saja kebanyakan pelatihan dilakukan dari pagi hingga siang hari. Sehingga peserta pelatihan mendapatkan snack dan makan di tempat pelatihan mengisi istirahat dan jam makan siang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Puput selaku peserta pelatihan lukis kaca (grafier) yang mengungkapkan :

> "Saya dapat uang transport total yang diberikan kira-kira sebesar Rp. 670.000 an Di tempat pelatihan juga dapat jajan dan makan setiap hari. Setelah pelatihan selama 24 hari selesai, kita juga mendapat bantuan alat-alat lukis kaca (grafier). Tapi itu tidak diberikan seacara perseorangan. Bantuan alat diberikan per kelompok, jadi kurang berguna, karena sampai

> saat ini bantuan alat-alat tersebut masih dibawa ketua kelompok, tidak tau nasibnya bagaimana". (hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2014 jam 19.00 WIB di rumah Puput).

Bantuan dari pemerintah memang cukup banyak, mulai dari uang transport, makan dan snack hingga bantuan alat untuk nantinya bisa digunakan oleh peserta pelatihan dalam mengembangkan usahanya. Sehingga setelah pelatihan peserta pelatihan tidak perlu bingung akan modal dalam membeli alat-alat pelatihan, semua telah disediakan oleh pemerintah jika memang mau mengembangkan usahanya. Namun, yang disayangkan adalah bantuan berbentuk barang yang jauh lebih bermanfaat itu justru tidak diberikan secara individu melainkan secara kelompok. Sehingga alat-alat tersebut atas nama kelompok bukan atas nama pribadi. Bapak Totok selaku peserta pelatihan service hp mengungkapkan :

> "Bantuan pemerintah itu berupa uang transport sebesar Rp. 280.000 di tempat pelatihan juga dapat makan serta snack. Kami juga mendapatkan bantuan alat-alat untuk service hp. Ada estalase, obeng 1 set, lampu penerangan dan masih banyak lagi. Kebetulan saya ketua kelompok jadi saya yang membawa alat-alat tersebut. Yang disayangkan adalah bantuan tersebut atas nama kelompok bukaan pribadi, jadi menurut saya tidak bermanfaat sama sekali, teman satu kelompok saya saja sudah minta bagian suruh menjual bantuan yang berupa alat-alat tersebut kemudian nanti hasilnya baru dibagi ber 5. Jadi ya percuma, padahal alat yang diberikan cukup lengkap, kalau mau bekerja sama mengembangkan usaha pastinya akan lebih menguntungkan". (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 jam 13.00 di rumah Bapak Totok).

Sebenarnya bantuan pemerintah yang berupa alat-alat ini cukup bagus. Tidak lagi memberikan bantuan berupa uang, cukup dengan uang transport saja. Karena bantuan berupa uang nantinya tidak akan berwujud. Tapi jika bantuan berupa alat pastinya seseorang sudah tidak perlu lagi membeli alat-alat yang dipergunakan untuk mengembangkan usahanya. Namun alat yang diberikan atas

nama kelompok juga kurang efektif, karena kebanyakan orang tidak mau untuk mengembangkan usahanya secara bersama sama, tututan akan hak yang sama untuk menikmati bantuan tersebut juga akan dilakukan bagi masing-masing peserta pelatihan, yang kemudian kebanyakan memutuskan tidak memakainya sama sekali atau bahkan menjualnya dan hasilnya dibagi sama rata dengan anggota kelompok lain. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ibu Wiji Lestari selaku peserta pelatihan budidaya jamur mengungkapkan :

> "Bantuan yang syaa terima dari pemerintah ada uang transport Rp. 196.000 karena perhari sekitar Rp. 30.000 dan dipotong pajak. Di tempat pelatihan juga dapat makan karena pulang samapai siang. Ada bantuan alat juga seperti rumah jamurnya itu cukup besar, bibit, dan juga alat lain untuk pembudidayaan jamur ini. Cuman alatnya ditaruh disebelah rumah tidak ada yang bawa, kena hujan akhirnya sudah banyak yang rusak semua. Seumpama bantuan yang diberikan tidak bersifat kelompok saya mau mengembangkan usaha budidaya jamur itu, gampang kok mbak. Ya untuk menambah penghasilan saya sehari-hari yang cuman jualan jajan dirumah. Tapi karena punya kelompok dan kalau mau pake sendiri tidak enak sama yang lain ya sudah dibiarin saja alat-alatnya". (hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2014 jam 12.00 di rumah Ibu Wiji Lestari).

Keberhasilan program ini dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Blitar dengan memberikan pelatihan secara gratis bagi warga miskin tentunya tidak hanya cukup memberikan pelatihan gratis, instruktur yang handal, ataupun bantuan uang transport dan makan saja. Bantuan alat-alat untuk pengembangan usaha nantinya menjadi sangat penting bagi peserta pelatihan. Tentunya bantuan tersebut bukan atas nama kelompok melainkan atas nama individu.

Penggunaan bantuan alat secara individu akan lebih bermanfaat, karena akan mendorong peserta pelatihan mengembangkan usahanya daripada harus membiarkan alat-alat tersebut rusak. Bekal ilmu yang didapat selama pelatihan juga sebagai pendukung dalam memanfaatkan bantuan alat-alat dari pemerintah.

Jika peserta pelatihan mendapatkan bantuan alat secara individu dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha, tentunya melalui program pelatihan secara gratis dari pemerintah secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Blitar.

b.8 Penerapan pelatihan sebagai pekerjaan

Pemberian pelatihan tentunya berguna dalam menunjang seseorang untuk mencari atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun utuk saat inii warga miskin yang dilatih pada tahun 2013 masih belum ada yang menggunakan keterampilannya karena beberapa faktor yang masih belum memungkinkan warga miskin untuk mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Puput selaku peserta pelatihan lukis kaca (grafier) mengungkapkan :

> "Untuk saat ini masih belum mencari pekerjaan yang berkaitan dengan lukis kaca. Karena ya masih baru selesai pelatihan November 2013 kemarin. Saat ini masih kembali ke pekerjaan awal sebagai tukang parkir pasar. Sebenarnya ingin, tapi masih kebentur biaya untuk membeli alat-alatnya. Dapat alat dari Dinsosnaker juga untuk kelompok". (hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2014 jam 19.00 WIB di rumah Puput).

Pelaksanaan pelatihan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk yang 2013 baru berakhir November 2013. Sehingga untuk membuka lapangan pekerjaan atau untuk mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pelatihan yang telah ditekuni dirasa terlalu cepat. Dibutuhkan waktu untuk bisa mengumpulkan dana untuk membeli alat-alat mengingat bantuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sendiri bukan bersifat individu melainkan kelompok. Pak Totok selaku peserta pelatihan service hp mengungkapkan :

> "Sebenarnya saya ingin sekali membuka usaha service hp ini, sebenarnya mudah, tapi ya terbentur biaya untuk membeli alat-alatnya. Dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memang dapat bantuan alat, kebetulan saya ketua kelompoknya jadi alatnya saya yang bawa. Anggota saya ajak untuk membuka usaha ini, tapi repot, ada beberapa orang yang tidak setuju dan minta bantuan alat dijual, kemudian hasilnya dibagi 1 kelompok. Ya mungkin kedepan saya bisa nabung untuk membuka usaha ini, karena sudah berbekal ilmu tinggal membeli alat-alatnya saja". (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 Jam 13.00 WIB di rumah Pak Totok).

Pemberian pelatihan untuk yang tahun 2013 belum tentu tidak efektif. Pelaksanaanya memang baru saja usai. Tetapi mereka telah memiliki bekal keterampilan yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan meningkatkan pendapatan. Keterampilan ini bisa dikembangkan nantinya setelah mereka memiliki modal sendiri untuk membeli alat-alat serta kebutuhan lain dalam membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang telah ditekuni.

2. Faktor yang Mempengaruhi Program Pelatihan Bagi Warga Miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

Dalam melaksanakan suatu program dari pemerintah seperti pelatihan bagi warga miskin secara gratis ini tentunya ada berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar yang menentukan berhasil atau tidaknya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai instansi pemerintah yang memberikan program pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, berikut ini adalah data berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam memberikan pelatihan.

a. Faktor pendukung

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelatihan secara gratis bagi warga miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dituntut untuk

menjalankan program ini sebaik mungkin dan menjamin keberhasilan program tersebut. Sesuai dengan tujuan pemerintah yang berusaha megentaskan kemiskinan di Kota Blitar dan memberdayakan warga miskin yang masih usia produktif agar bisa memperoleh keahlian sehingga mempermudahkan mereka dalam mencari pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Program tersebut tidaak akan berjalan dengan lancar jika tidak adanya faktor pendukung dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdapat 2 faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelatihan bagi warga miskin ini, yaitu :

a.1 Faktor pendukung internal

Faktor pendukung program pelatihan bagi warga miskin yang berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar itu sendiri adalah anggaran. Anggaran yang nantinya untuk memenuhi segala macam kebutuhan selama proses pelatihan. Anggaran ini merupakan faktor pendukung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam menjalankan program tersebut.

Menurut Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Anggaran dari pemerintah ini cukup tidak kurang. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelatihan seperti membayar lembaga pelatihan yang nantinya untuk instruktur pelatihan itu sendiri, untuk biaya transport peserta pelatihan, biaya makan dan snack selama menjalani pelatihan, serta membeli alat-alat sebagai bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usahanya". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 11.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Anggaran dari pemerintah ini nantinya untuk dana pelatihan termasuk biaya lembaga, instruktur pelatihan, biaya transport peserta pelatihan, biaya makan dan snack, serta biaya untuk membeli peralatan sebagai bantuan dari pemerintah. Terpenuhinya kebutuhan peserta pelatihan betujuan untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran program tersebut. Mengingat bahwa peserta pelatihan mayoritas bekerja sebagai serabutan dimana sehari tidak bekerja maka hari itu tidak mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya transport dan jatah makan ditambah snack setiap harinya sebagai pengganti upah setiap harinya yang diterima disaat kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak membebani kebutuhan hidup peserta pelatihan selama menjalani proses pelatihan untuk beberapa hari.

Anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan selama proses pelatihan ini tentunya mendorong warga miskin untuk ikut serta mendaftar program pelatihan ini. Pelatihan yang tidak dipungut biaya, serta dapat bantuan dari pemerintah meningkatkan minat warga miskin tentunya karena merasa kebutuhan sehari-harinya terpenuhi meskipun tidak bekerja pada hari itu. Memperoleh ilmu secara gratis yang kemudian sebagai bekal mereka untuk mencari kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yang bisa menghasilkan dan mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka nantinya.

a.2 Faktor pendukung eksternal

Selain dukungan dari dalam yaitu dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar sendiri, ada dukungan dari luar yang juga menunjang keberhasilan program pelatihan bagi fakir miskin. Dalam menjalankan programnya Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan lain dalam melatih warga miskin sesuai dengan jenis-jenis pelatihan yang telah disusun oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tersebut. Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Kalau berbicara faktor pendukung eksternal, maksutnya dukungan dari luar Dinas ini sendiri ya lembaga pelatihan masing-masing. MB Glass yaitu sebagai lembaga pelatihan lukis kaca (grafier), kemudian Warna Garden lembaga pelatihan budidaya jamur, dan BLK Otomotif dan LPK Intermedia sebagai lembaga pelatihan service hp. Selain lembaga pelatihan itu sendiri instruktur-instruktur pelatihan yang ahli dibidangnya dan mengerti kondisi peserta pelatihan juga menjamin keberhasilan serta kelancaran program ini. Para instruktur ini sabar, karena yang mereka latih bukan orang-orang berpendidikan tinggi melainkan sebaliknya". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 11.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Lembaga pelatihan sebagai tempat proses pelatihan ini berlangsung jika tidak ditunjang dengan keberadaan instruktur, maka program tersebut tidak akan berjalan. Instruktur yang berperan secara aktif dalam keberhasilan program ini dengan memberikan ilmunya kepada peserta pelatihan merupakan hal pokok dalam proses pelatihan. Mulai dari menyampaikan materi, membimbing hingga menilai hasil pelatihan secara individu. Instruktur yang diajak kerjasama ini, adalah instruktur yang berpengalaman tentunya, meskipun demikian para instruktur menyesuaikan kondisi peserta yang dilatih. Karena mereka berasal dari warga miskin mayoritas memiliki tingkat pendidikan rendah yang pastinya berbeda dengan orang-orang berpendidikan tinggi.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung yang mampu memberikan dorongan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam menjalankan program pelatihan bagi warga miskin, terdapat pula faktor penghambat yang memberikan tekanan tersendiri bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Tekanan tersebut juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya program ini. Meskipun demikian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berusaha meminimalisir adanya hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdapat 2 faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan bagi warga miskin ini, yaitu :

b.1 Faktor penghambat internal

Faktor penghambat yang berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini sendiri adalah mengenai kurangnya sosialisasi program tersebut kepada masyarakat, tidak hanya itu saja banyaknya kerjaan di dinas sehingga membuat rencana tidak tepat waktu. Hambatan-hambatan seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk diminimalisir. Sosialisai melalui baner, radio, melalui pegawai dinas sendiri yang mencari warga miskin di sekitar tempat tinggal sebenarnya bisa dilakukan. Peningkatan kinerja pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga sangat diperlukan, agar pekerjaan cepat terselesaikan sehingga rencana yang telah disusun segera terlaksana. Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Kalau menurut saya faktor penghambat internal atau dari dalam dinas ini sendiri yaitu kurangnya sosialisasi akan program yang kami buat ini. Sosialisasi hanya melalui kelurahan atau pegawai dinas yang menyebarkannya di tempat tinggal sekitar selain itu banyaknya pekerjaan di dinas sehingga rencana yang dibuat sudah ada, tapi waktunya yang mundur, selain itu juga program masih ada yang salah sasaran untuk meminimalisir salah sasaran ini melakukan koordinasi dengan Pak Lurah. Melalui formulir juga, karena dalam formulir ini Pak Lurah bertanggung jawab". (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 jam 11.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media seperti koran Blitar, baner, jadi tidak hanya melalui kelurahan atau pegawai dinas sosial itu sendiri akan lebih cepat menyebar. Karena pelatihan ini sendiri dikhususkan bagi warga miskin yang berdomisili di Kota Blitar, bukan kabupaten. Jika banyak warga miskin yang mengetahui akan program ini maka beberapa dari mereka akan mendaftarkan diri. Selain mendapatkan ilmu secara gratis, bantuan dari pemerintah berupa dana maupun alat-alat juga sangat menunjang. Tapi tetap, meskipun demikian harus dipantau dan kerjasama dengan pihak kelurahan untuk meminimalisir kecurangan. Kelurahan sendiri juga tidak akan mengijinkan kalau tidak ada surat pengantar dari RT maupun RW setempat yang mengetahui kondisi warganya secara pasti.

Peningkatan kinerja pegawai juga sangat penting, semua program yang telah di susun setiap tahunnya tergantung pada kinerja pegawai. Jika masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, maka program yang telah disusun dan harusnya dilakukan tepat waktu justru akan terlambat. Hal ini yang terjadi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

b.2 Faktor penghambat eksternal

Selain penghambat internal ada juga faktor penghambat yang berasal dari luar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tersebut, dimana peserta pelatihan bertidak semaunya sendiri. Saat ini daftar seketika itu juga mengundurkan diri. Bapak S. Rohana Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengungkapkan :

> "Faktor penghambat eksternalnya itu justru dari peserta pelatihan. Saat pendaftaran ikut mendaftar, menulis formulir lengkap. Hari pertama masuk pelatihan, besoknya tiba-tiba mengundurkan diri dengan beberapa alasan, ada juga yang untuk beberapa pertemuan tidak masuk atau mbolos. Ya itu kita yang repot, karena kita sudah menyusun laporan, membuat absen harus merubah kalau ada yang mengundurkan diri. Kalau ada yang tidak masuk ya repot, mengingat pelatihan ini kan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya singkat minimal 7 hari dan maksimal hanya 24 hari tergantung jenis pelatihan yang diambil. Jika ada yang tidak masuk tentunya ketinggalan materi atau tidak ikut praktek. Nah ini kan jadi tidak maksimal proses pelatihannya". (hasil wawancara pada 29 Januari 2014 jam 11.00 WIB di ruang kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar).

Peserta pelatihan dari kalangan warga miskin memang perlu dimaklumi kalau tingkat keseriusannya sangat rendah. Mereka kebanyakan selain terbatas dalam modal dan tingkat pendidikan yang rendah perasaan malas dan juga pasrah terhadap kondisi yang sekarang menjadi faktor penghambatnya juga. Mereka yang daftar kemudian sering tidak hadir atau bahkan mengundurkan diri berarti telah menunjukkan ketidak seriusan dalam menjalani proses pelatihan. Hal ini juga tidak perlu disayangkan, karena warga miskin yang seperti itu nantinya jika mendapatkan bantuan modal baik itu berupa dana ataupun alat-alat tidak agan berguna sebagai mana mestinya.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Program Pemerintah Dalam Menangani Warga Miskin Melalui Pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi baik itu daya pikir ataupun daya fisik yang dimiliki oleh seseorang. Hal tersebut menjadi unsur utama dalam kehidupan, kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya menunjukkan bahwa posisi sumber daya manusia (SDM) sangat sentral adanya. Bisa dikatakan alat secanggih apapun tidak akan ada tanpa peran aktif sumber daya manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu sumber daya manusia yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan hidupnya nanti. Masyarakat yang sejahtera tentunya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan warganya. Tidak ada pengecualian bagi sumber daya manusia yang bermasalah dengan kemampuan untuk mendapatkan pelatihan dari pemeritah. Tujuan pemerintah sendiri adalah untuk memberdayakan warga dengan serba keterbatasan baik itu modal maupun keahlian yang dimiliki dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "empowerment" yaitu upaya untuk mngaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, Suryono dan Trilaksono (2008:25). Artinya setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan kemandiriannya, tapi tidak semua orang bisa, seperti halnya warga miskin yang berada di Kota Blitar rata-rata kendalanya dikarenakan keterbatasan modal, keterbatasan dalam berusaha, dan keterampilan

yang minim. Usaha pemerintah Kota Blitar memberdayakan warga miskin melalui pemberian pelatihan secara gratis ini dengan tujuan membangun masyarakat agar produktif dan berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri mereka.

Pemberdayaan sebagai suatu upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian, White (Suhendra 2006:77). Pada tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan 3 jenis pelatihan gratis yaitu pelatihan lukis kaca, budidaya jamur dan srvice hp. Tentunya 3 keterampilan yang diberikan suatu saat bisa menjadi pekerjaan dan menambah pendapatan warga miskin, karena 3 keterampilan tersebut memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Lukis kaca (grafier) merupakan kaca polos yang kemudian dilukis dihias dengan cat khusus sesuai dengan bentuk pola yang di inginkan ini bisa menjadi hiasan rumah, kantor dan tempat lainnya. Kota Blitar yang juga mengandalkan objek pariwisata seperti yang terkenal Makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang sebagai pendapatan daerah tentunya menjadi daya tarik tersendiri oleh wisatawan dari luar Kota Blitar. Sektor perdagangan contohnya terlihat kios-kios berada di sekitar Makam dan Perpustakaan Bung Karno menjual beraneka ragam pernik-pernik khas Kota Blitar. Jika peserta pelatihan menekuni keterampilan lukis kaca (grafier) ini dan membuat beraneka macam hiasan berbahan kaca hingga memiliki nilai jual yang bisa menjadi daya tarik wisatawan sebagai cindera mata, menjadi daya tarik penduduk lokal untuk hiasan di rumah, tentunya bisa menambah penghasilan.

Begitu pula dengan usaha budidaya jamur, saat ini jamur bukan lagi sebagai makanan mahal yang hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Namun jamur sudah menjadi makanan sehari-hari yang bisa dikonsumsi. Karena sudah banyak ditemukan berbagai olahan dari jamur yang tidak hanya di goreng. Tapi juga bisa untuk kripik, bakso, nugget, dan campuran makanan lainnya. Tentunya permintaan pasar akan jamur semakin meningkat seiring dengan temuan-temuan makanan baru yang bisa diolah dengan menggunakan jamur.

Untuk service hp sendiri, penggunaan masyarakat akan benda ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Bahkan untuk satu orang saja penggunaan hp lebih dari 1 unit. Sebagai barang elektronik yang termasuk mudah rusak karena penggunaannya lebih saering dibandingkan barang elektronik lain, tentunya membutuhkan tempat service untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Secara keseluruhan artinya, pemerintah Kota Blitar dalam memberikan pelatihan tentunya melihat peluang kerja dan usaha yang nantinya akan didapat, nantinya menjanjikan atau tidak.

Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat oleh Jim Ifa (Zubaedi 2007:45) yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. Dalam strategi ini pemerintah melalui pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dimana dalam proses pelatihan itu sendiri instruktur menumbuhkan kesadaran yang dilakukan dengan proses mendidik warga miskin

dalam rangka membekali mereka pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang diambil masing-masing mulai dari bahan dan alat yang dipergunakan, cara pembuatan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tentunya memegang peranan penting dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki peserta untuk dapat mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

a. Kelompok Sasaran Warga Miskin

Kemiskinan memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Hingga saat ini kemiskinan begitu jelas terlihat di kota-kota dimana jumlah orang miskin di daerah perkotaan semakin bertambah. Pengentasan kemiskinan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab negara melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melihat kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai program, seperti program pelatihan yang tidak dipungut biaya sama sekali ini. UU 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” artinya bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan terhadap warga miskin. Hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada warga miskin secara terencana dan berkelanjutan.

Program pelatihan secara gratis bagi warga miskin di Kota Blitar merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mengentaskan kemiskinan. Apalgi pemerintah Kota Blitar dalam visinya yaitu "Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera Yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015" yang artinya secara garis besar bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Pelatihan gratis yang didukung oleh adanya bantuan uang transport, makan dan snack, serta bantuan alat-alat ini anggaranya dari APBD Kota Blitar.

Dalam memberikan pelatihan tentunya diberikan kepada warga miskin yang benar-benar tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesbilitas pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan dan fasilitas hidup lainnya, Suryono (2010:223). Seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam mencari peserta pelatihan ini harus tepat sasaran, jadi warga miskin yang bisa ikut, adalah mereka yang pastinya usia produktif 18-45 tahun, tidak memiliki pekerjaan tetap (serabutan), penghasilanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sumber daya manusianya rendah sehingga akses untuk mencari pekerjaan itu susah.

Tidak semua masyarakat yang tidak mampu itu disebut sebagai warga miskin, warga miskin adalah mereka yang memiliki kelemahan dalam kemampuan berusaha dan keterbatasan dalam mengakses peluang usaha sehingga

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup sulit. Beberapa ciri-ciri kemiskinan oleh Smeru (Suryono dan Trilaksono 2008:46) yang sesuai dengan kebanyakan warga miskin di Kota Blitar meliputi :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
5. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

Secara garis besar warga miskin yang mengikuti pelatihaan adalah mereka yang sebagian besar sesuai dengan ciri-ciri diatas tersebut. Untuk menghindari dan untuk mempermudah hal tersebut pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberi informasi kepada kelurahan yang kemudian di sampaikan kepada RT/RW setempat karena mereka lebih mengerti keadaan langsung warganya, kemudian yang bersangkutan datang langsung ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mendaftar. Hal ini bertujuan agar sasaran pelatihan gratis ini bisa tepat. Mereka yang memiliki keterbatasan sebelumnya entah itu pendidikan yang rendah, minimnya keahlian yang dimiliki, serta keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha, nantinya dengan pelatihan ini bisa teratasi. Bekal keahlian yang didapat, serta bantuan berupa alat-alat dari pemerintah dan juga

uang transport yang bisa dijadikan modal dalam pengembangan usaha. Secara langsung program pemerintah ini berusaha mengentaskan kemiskinan di Kota Blitar, mereka yang nantinya mampu mencari pekerjaan sesuai dengan bidang yang ditekuni atau bahkan membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan sehari-hari, yang kemudian kebutuhan pokok sehari-hari mampu terpenuhi, mengurangi pengangguran dan mereka (wargaa miskin) memiliki pekerjaan tetap selain bekerja serabutan.

b. Program Pelatihan

Pelatihan tidak hanya sekedar membuat seseorang menjadi ahli dan terampil pada satu jenis bidang pelatihan yang ditekuni. Namun pelatihan merupakan sarana untuk membentuk kemandirian seseorang agar dapat mengembangkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Kebanyakan warga miskin minim akan keahlian yang dimiliki, sehingga tidak banyak yang dilakukan untuk menyambung dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pelatiahan sebagai suatu hal yang melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat menggunakannya dalam suatu pekerjaan, Wibowo (2007:442). Keahlian yang didapat nantinya bisa menjadi bekal untuk mencari atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ini yang menjadi tujuan pemerintah membuat program pelatihan gratis.

Seperti bunyi pasal 11 UUD No.13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh dan meningkatkan kompetensi kerja

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja". Tanpa mengesampingkan program yang telah dibuat oleh pemerintah seperti halnya program pelatihan yang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bertumpu pada pemberian keterampilan tentunya menjadi upaya untuk memberdayakan dan menciptakan kemandirian masyarakat akan sangat berarti untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam memberikan pelatihan ini tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu :

b.1 Lembaga pelatihan

Sebagai tempat berlangsungnya proses pelatihan, tempat transfer ilmu dan keahlian dari instruktur kepada para peserta pelatihan. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain dalam memberikan pelatihan dinilai lebih efektif dan efisien karena tersedia instruktur yang profesional dengan alat-alat yang lengkap tersedia serta tempat pelatihan yang nyaman dan lebih khusus sesuai dengan bidang pelatihan. Warga miskin yang mengikuti pelatihan datang langsung ke tempat pelatihan untuk memperoleh pembekalan materi maupun praktek secara langsung. Hal ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menjalankan program pelatihan bagi warga miskin.

b.2 Jenis pelatihan

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Blitar untuk warga miskin tahun 2013 ada 3 jenis pelatihan, yang meliputi :

a. Pelatihan lukis kaca (grafier)
b. Peltihan budidaya jamur

c. Pelatihan service hp

Tentunya pelatihan-pelatihan yang diberikan ini bisa menjadi prospek kerja yang bagus nantinya. Mempunyai nilai usaha yang bagus sehingga menciptakan kemandirian seseorang dalam mengembangkan potensinya dan menghsilkan. Pemberian pelatihan ini juga dilihat dari sisi modal pengembangan usaha, tidak banyak modal yang harus digunakan nantinya mengingat peserta pelatihan adalah warga miskin yang terbatas akan biaya.

b.3 Instruktur pelatihan

Instruktur adalah komponen paling penting dalam berjalannya proses pelatihan karena instruktur adalah orang yang mulai memberikan materi, membimbing, hingga menilai berhasil atau tidaknya peserta pelatihan menjalani proses pelatihan. Pelatih adalah orang yang memiliki keahlian dan melatih mengenai keahlian yang dimilikinya tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:644).

Instruktur yang mengajar pada lembaga tersebut, diharapkan tidak hanya sekedar memberikan pelatihan saja, tetapi menciptakan susasana pelatihan yang kondusif dan juga memberikan motivasi peserta pelatihan. Mengingat bahwa peserta pelatihan adalah warga miskin, kebanyakan dari mereka memiliki tingakat pendidikan rendah sehingga daya tangkap ilmu juga sedikit sulit dan juga rasa minder atau kurang percaya diri.

b.4 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pelatihan merupakan penunjang keberhasilan pelatihan itu sendiri. Meskipun sarana dan prasarana dirasa sudah lengkap dan

memadai tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan. Seperti kelompok sasaran warga miskin ini yang serba terbatas sehingga dalam menerima materi sedikit susah tidak terbiasa menggunakan alat-alat modern. Diperlukan sarana dan prasarana yang sesederhana mungkin, karena nantinya bantuan alat yang diberikan oleh pemerintah juga bersifat sederhana.

b.5 Jadwal pelatihan

Pengaturan jadwal diperlukan agar pelatihan bisa tersusun dan terarah sesuai waktu yang telah ditentukan. Setiap jenis pelatihan seperi budidaya jamur, service hp dan juga lukis kaca (grafier) memiliki jangka waktu yang berbeda beda untuk sampai mengerti, memahami hingga sanggup untuk mempraktekkan secara langsung. Tapi meskipun dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin tentunya sudah ada perhitungan dan pertimbangan dari instruktur pelatihan. Untuk lebih rincinya budidaya jamur dilakukan 7 hari selama 7 jam, untuk service hp dilakukan 10 hari hanya 3 jam pelatihan saja, sedangkan untuk lukis kaca (grafier) selama 24 hari selama 4 jam.

b.6 Metode pelatihan

Menggunakan beberapa cara atau metode dalam proses pelatihan dapat membantu memudahkan peserta pelatihan dalam memahami objek yang menjadi sasaran ilmu sesuai dengan jenis pelatihan yang telah dipilih. Metode yang dipilih instruktur pelatihan juga sangat sederhana. Yaitu antara 20% materi dan 80% praktek. Untuk hari pertama pertemuan digunakan sebagai pegenalan alat dan bahan. Dessler (2008:285-295) dalam bukunya yang berjudul *Human Resource*

Management menyatakan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pelatihan diantaranya yang berkaitan dengan pelatihan warga miskin ini menggunakan metode pengajaran yaitu merupakan cara yang cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok orang yang dilatih. Instruktur sebelum memberikan pelatihan menggunakan waktu 1 hingga 2 hari untuk menyampaikan beberapa materi penting secara gariss besar mengenai jenis pelatihan yang diambil.

Selanjutnya dengan praktek kerja langsung, Dessler (2008: 285-295) menjelaskan pelatihan dengan simulasi yaitu sebuah metode dimana orang-orang yaang dilatih belajardengan peralatan yang sebenarnya atau dengan simulasi yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan, tapi sebenarnya mereka dilatih diluar pekerjaan. Dalam praktek secara langsung ini lebih banyak digunakan yaitu sekitar 80% dari total proses pelatihan, warga miskin dalam pelatihan budidaya jamur dan juga lukis kaca (grafier) dianjurkan untuk membuat hasilnya secara langsung yang kemudian nantinya sebagai penilaian instruktur apakah peserta pelatihan telah menguasai materi yang diberikan. Begitu juga dengan service hp, peserta dianjurkan untuk membawa hp yang rusak untuk dibenahi sebagai proses pelatihan melalui praktek langsung.

b.7 Bantuan dari pemerintah bagi peserta pelatihan

Bantuan ini sebagai penarik minat warga miskin agar tertarik mengikuti pelatihan secara gratis ini. Uang transport, makan dan snack di siang hari untuk mengisi saat istirahat pelatihan sebagai pengganti pendapatan sehari-hari peserta pelatihan yang mayoritas bekerja serabutan. Bantuan alat-alat sesuai dengan jenis

pelatihan yang telah diambil juga sebagai pendorong serta pendukung peserta pelatihan untuk mengembangkan kemandiriannya, mengembangkan ilmu yang telah didapat saat pelatihan untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan sehari-hari.

b.8 Penerapan pelatihan sebagai pekerjaan

Untuk saat ini beberapa warga miskin yang mendapatkan pelatihan dari hasil wawancara peneliti, masih belum ada yang menggunakan keterampilannya untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan. Karena memang pelatihan ini selesai pada November 2013 lalu. Kemungkinan karena waktu dari penelitian sendiri terlalu dekat. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk warga miskin nantinya bisa membuka usaha sendiri dengan mengumpulan modal terlebih dahulu untuk membeli segala peralatan dan kebutuhan dalam membuka usaha. Sesuai dengan harapan warga miskin yang memang ingin menggunakan keterampilannya untuk menambah pendapatan dan memperbaiki kualitas hidupnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Program Pelatihan Bagi Warga Miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

a. Faktor pendukung

Dalam proses pelatihan secara gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar pelaksanaanya tentunya bisa berhasil, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai apabila didukung oleh

beberapa faktor pendukung baik itu dukungan dari dalam maupun dukungan dari luar organisasi itu sendiri.

a.1 Faktor pendukung internal

Dukungan dari dalam ini berasal dari anggaran pemerintah yang dirasa cukup. Anggaran ini nantinya dipergunakan untuk segala keperluan selama proses pelatihan. Baik biaya sewa lembaga pelatihan termasuk instruktur pelatihan, biaya transport peserta pelatihan, makan dan snack, serta anggaran untuk membeli alat-alat sebagai bantuan dari pemerintah.

b.2 Faktor pendukung eksternal

Sedangkan dari luar yang mendukung program pelatihan ini adalah lembaga pelatihan sebagai tempat proses pelatihan ini berlangsung dan ditunjang dengan keberadaan instruktur. Instruktur yang berperan secara aktif dalam keberhasilan program ini dengan memberikan ilmunya kepada peserta pelatihan merupakan hal pokok dalam proses pelatihan. Mulai dari menyampaikan materi, membimbing hingga menilai hasil pelatihan secara individu.

b. Faktor penghambat

Program pelatihan bagi wargaa miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini pastinya dalam pelaksanaanya masih ada hambatan yang menjadi tekanan tersendiri bagi dinas ini sendiri. Hambatan ini bisa terjadi di dalam maupun di luar dinas.

b.1 Faktor penghambat internal

Hambatan dari dalam mengenai kurangnya sosialisasi program tersebut kepada masyarakat, tidak hanya itu saja banyaknya kerjaan di dinas sehingga membuat rencana tidak tepat waktu. Hambatan-hambatan seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk diminimalisir. Sosialisai melalui baner, radio, melalui pegawai dinas sendiri yang mencari warga miskin di sekitar tempat tinggal sebenarnya bisa dilakukan. Peningkatan kinerja pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga sangat diperlukan, agar pekerjaan cepat terselesaikan sehingga rencana yang telah disusun segera terlaksana.

b.2 Faktor penghambat eksternal

Sedangkan hambatan dari luar yaitu berkaitan dengan peserta pelatihan itu sendiri. Peserta pelatihan dari kalangan warga miskin memang perlu dimaklumi kalau tingkat keseriusannya sangat rendah. Mereka kebanyakan selain terbatas dalam modal dan tingkat pendidikan yang rendah perasaan malas dan juga pasrah terhadap kondisi yang sekarang menjadi faktor penghambatnya juga. Mereka yang daftar kemudian sering tidak hadir atau bahkan mengundurkan diri berarti telah menunjukkan ketidak seriusan dalam menjalani proses pelatihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program pemerintah dalam menangani warga miskin melalui pelatihan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

a. Kelompok sasaran warga miskin

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi baik itu daya pikir ataupun daya fisik yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya menunjukkan bahwa posisi sumber daya manusia (SDM) sangat sentral adanya. Usaha itu ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan secara gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan warga miskin sehingga memiliki keahlian dan menciptakan kemandirian nantinya sebagai bekal mencari kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Pelatihan ini disasarkan untuk warga miskin, artinya mereka yang bisa ikut, adalah mereka yang pastinya usia produktif 18-45 tahun, tidak memiliki pekerjaan tetap (serabutan), penghasilanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sumber daya manusianya rendah sehingga akses untuk mencari pekerjaan itu susah. Untuk menghindari salah sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan kelurahan yang kemudian menunjuk RT/RW mencari warganya untuk diikutsertakan dalam pelatihan ini.

Pelatihan lukis kaca (grafier) ini dilaksanakan selama 24 hari. Dilaksanakan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

2. Pelatihan budidaya jamur yang bertempat di Warna Garden daerah Bendogerit Kota Blitar. Instruktur pelatihan bernama Bapak Didik. Pelatihan budidaya jamur ini dilaksanakan selama 7 hari. Dilaksanakan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB.
3. Pelatihan service hp yang bertempat di BLK Otomotif dan LPK Intermedia jalan Cemara No. 345 Kota Blitar. Pelatihan lukis service hp ini dilaksanakan selama 10 hari. Dilaksanakan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Mengenai sarana dan prasarana sudah lengkap, mengingat lembaga-lembaga pelatihan yang ditunjuk merupakan lembaga yang sudah lama berdiri, selain itu seperti budidaya jamur dan lukis kaca (grafier) memang sebagai tempat produksi yang kemudian hasilnya dijual di pasaran. Sudah tidak diragukan lagi bahwa sarana dan prasarana peltihan sudah menunjang keberhasilan proses pelatihan.

Untuk metode pelatihan sendiri, karena yang dilatih adalah mereka warga miskin sehingga metode yang digunakan instruktur tidak rumit. Sekitar 20% teori dan sekitar 80% praktek secara langsung. Hari pertama pertemuan digunakan instruktur untuk pembekalan materi-materi yang berkaitan dengan jenis pelatihan yang diambil. Selanjutnya peserta pelatihan praktek secara langsung membuat pruduk tersebut seperi lukis kaca (grafier) dan budidaya jamur namun untuk service hp peserta pelatihan praktek memperbaiki hp yang rusak, sejalan dengan

itu evaluasi atau penilaian juga dilakukan oleh paara instruktur sejauh mana peserta pelatihan paham akan materi yang diberikan.

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut pemerintah menyediakan bantuan berupa uang transport selama pelatihan sebesar Rp. 28.000, mendapatkan jatah makan dan snack untuk makan siang selama pelatihan, serta bantuan alat-alat sesuai dengan jenis pelatihan yang diambil. Bantuan alat-alat dari pemerintah ini bersifat kelompok, dimana 1 kelompok beranggotakan 5 orang.

Meskipun demikian ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelatihan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tersebut, faktor itu meliputi :

a. Faktor pendukung dari dalam yaitu anggaran anggaran pemerintah yang dirasa cukup. Anggaran ini nantinya dipergunakan untuk segala keperluan selama proses pelatihan. Baik biaya sewa lembaga pelatihan termasuk instruktur pelatihan, biaya transport peserta pelatihan, makan dan snack, serta anggaran untuk membeli alat-alat sebagai bantuan dari pemerintah. Sedangkan faktor pendukung dari luar yaitu lembaga Sedangkan dari luar yang mendukung program pelatihan ini adalah lembaga pelatihan sebagai tempat proses pelatihan ini berlangsung dan ditunjang dengan keberadaan instruktur yang berperan secara aktif mulai dari menyampaikan materi, membimbing hingga menilai hasil pelatihan secara individu.
b. Faktor penghambat dari dalam yaitu mengenai kurangnya sosialisasi program tersebut kepada masyarakat sehingga banyak warga miskin yang tidak tahu akan program ini, tidak hanya itu saja banyaknya kerjaan di dinas sehingga

membuat rencana tidak tepat waktu. Sedangkan hambatan dari luar berkaitan dengan peserta pelatihan itu sendiri, tingkat keseriusannya sangat rendah, perasaan malas dan juga pasrah terhadap kondisi sekarang sehingga ada beberapa yang daftar kemudian sering tidak hadir atau bahkan mengundurkan diri berarti telah menunjukkan ketidak seriusan dalam menjalani proses pelatihan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam maupun diluar organisasi ataupun harapan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa peserta pelatihan, yaitu meliputi :

1. Hendaknya program pelatihan ini yang telah di susun oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setiap tahunnya lebih disosialisasikan secara luas. Bisa melalui koran Kota Blitar, baner yang dapat dipasang dibeberapa titik kota, melalui radio. Selain hanya melalui kelurahan yang kemudian menunjuk RT/RW setempat untuk menunjukkan warganya. Terkadang RT dan RW hanya menunjuk warga tertentu saja, sehingga tidak semua warga mengetahuinya.
2. Perlu peningkatan kinerja pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu sendiri, hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang menyebutkan bahwa adanya pekerjaan yang menumpuk sehingga rencana yang telah dibuat menjadi mundur. Peningkatan

kinerja pegawai tentunya bisa mengerjakan segala pekerjaan tepat waktu yang nantinya tidak memperlambat rencana program yang telah dibuat.

3. Dalam memberikan pelatihan hendaknya peserta pelatihan disesuaikan dengan minat dan bakat oleh masing-masing peserta pelatihan (sesuai dengan potensi yang dimiliki). Karena pemilihan jenis pelatihan yang sesuai dengan potensi akan berpengaruh terhadap tingkat keseriusan peserta pelatihan dalam mendalami jenis pelatihan yang diambil.
4. Sebaiknya bantuan alat-alat untuk mengembangkan usaha sesuai dengan jenis pelatihan yang diambil itu bersifat individu bukan kelompok. Bantuan masih bersifat kelompok agar peserta pelatihan dalam mengembangkan usahanya tidak terhambat. Bantuan alat yang bersifat kelompok tentunya tidak akan efektif, karena pendapat tiap anggota dalam kelompok berbeda-beda ada yang ingin membuka peluang usaha berkaitan dengan jenis pelatihan yang diperoleh ada juga yang kembali ke pekerjaan semula sebagai pekerja serabutan.
5. Jika dana program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sudah dianggarkan mengingat program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tidak terpaku pada program pelatihan ini saja, maka diperlukan adanya pendampingan bagi peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti program ini. Pendampingan bisa dilakukan oleh dinas terkait yang bekerja sama dengan lembaga sekaligus instruktur pelatihan untuk tetap mendampingi peserta pelatihan hingga mereka mampu menciptakan atau

memproduksi barang tersebut sesuai jenis pelatihan yang diikuti hingga barang tersebut memiliki nilai jual di pasaran.

6. Sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan informasi kepada peserta pelatihan mengenai pinjaman melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mengembangkan usaha kecil mereka dengan modal pinjaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Arikunto, S. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara

_____. 1992. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara

Azwar. 2013. *Metode Penelitian.* Jakarta: Salemba

Bakri, Masykuri. 2009. *Dekonstruksi Jalan Terjal Pembangunan Perspektif Pendidikan, Pemberdayaan, dan Pelayanan Publik*. Surabaya: Visipress Media

Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta

Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Daft, Richard L. 2011. *Era Baru Manajemen*. Terjemahan Tita Maria Kanita dari *New Era of Management*. Jakarta: Salemba

Dessler, Gary. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Paramita Rahayu dari *Human Resource Management.* Jakarta: PT. Indeks

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka

Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Bandung: Refika Aditama

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

_____. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga

_____. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Ridlo, Mohammad Agung . 2001. *Kemiskinan di Perkotaan.* Semarang: Unisulla Press

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik S. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik.* Bandung: Nuansa

Samil, Emil. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan.* Jakarta: PT. Grafindo Persada

Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Soemarno. 1996. Ragam Wilayah Pedesaan Miskin dan Upaya Pengentasannya. Malang: PUSLIT PWD UNIBRAW

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Supardi, M.d. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press

Suryono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah.* Malang: Bayumedia

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

_____. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press

Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana

Syaffiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Syaifullah, Chavchay. 2008. *Generasi Muda Menolak Kemiskinan*. Klaten: Cempaka Putih

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Ruzz Media

Situs Internet :

Suharto, Edi. 1997. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi.* http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm. Diakses pada tanggal 14 November 2013

Blitar Kota. 2010. Peta Kota Blitar. http://www.blitarkota.go.id. Diakses pada tanggal 27 Februari 2014

Peraturan Perundang Undangan

UUD Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang tahun 1945 Pasal 27 ayat 2

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Penanganan Fakir Miskin

repository.ub.ac.id

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI BAKESBANG KOTA BLITAR

PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jl. Kalimantan No. 93 Telp./Fax. 0342-804063 Blitar

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 07 / 410.204 / 2014

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY / RESEARCH

Memperhatikan	:	Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal, 22 Desember 2013 Nomor : 94/UN 10.3/PG/2013 Perihal Permohonan Ijin Penelitian/ Ijin Memperoleh Data/Riset/suvey./Permohonanan Ijin Praktek Kerja Nyata Dengan ini menyatakan tidak keberatan Penelitian / Survey / Research dilakukan oleh :
Nama	:	**EKA FARAH DEWI APHRODITA EMAWATI**
NPM	:	105030101111013
Fakultas/Prodi	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Administrasi Publik
Alamat	:	JL.Kacapiring No.10 Rt/Rw. 02/03 Kel. Kepanjenkidul Kec.Kepanjenkidul Kota Blitar
Tempat Pelaksanaan	:	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Judul Penelitian	:	***" Program Pelatihan Bagi Warga Miskin"***
Waktu Pelaksanaan	:	Januari 2014 s/d Maret 2014

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam, setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan keadaannya kepada Camat setempat.
2. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
3. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar , 8 Januari 2014
An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KOTA BLITAR
Sekretaris

PR.PRABANDARI.SH
Pembina Tingkat.I
NIP. 19630912 198903 2 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth:
1. Ka. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
2. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Publik UNBRA
3. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAERAH
Jl. Jawa No.64 A Telp. 801292
B L I T A R

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 460 / 352 / 410.111.1 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a.	Nama	:	Dra. RINA AGUSTIATI, MT
b.	NIP		19630514 199003 2 006
c.	Jabatan		Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar

Dengan ini menerangkan berdasarkan Surat Keterangan Untuk melakukan Penelitian/Survey/Research dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 070/07/410.204/2014, bahwa :

a.	Nama	Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati
b.	NIM	105030101111013
c.	Tempat Lahir	Blitar
d.	Alamat	Jln. Kacapiring No.10 Blitar

telah melaksanakan penelitian/survey tentang Program Pelatihan bagi Fakir Miskin di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar selama 2 (dua) bulan yaitu pada Bulan Januari s/d Maret 2014

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 7 Mei 2014
A.n. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
DAERAH KOTA BLITAR
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAERAH

Dra. RINA AGUSTIATI,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19630514 199003 2 006

DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Peneliti : Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati
Tujuan : Penelitian Skripsi
Sasaran : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Materi : Program Pelatihan Bagi Warga Miskin

1. Apa tujuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini?
2. Apa tujuan adanya program pelatihan bagi fakir miskin dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar?
3. Pelatihan apa saja yang diberikan kepada peserta pelatihan?
4. Untuk peserta pelatihan sendiri yang sasaranya fakir miskin, apakah ada kriteria untuk bisa mengikuti pelatihan? (usia, pendapatan)
5. Adakah kemitraan atau kerjasama dengan pihak luar dalam memberikan pelatihan?
6. Jika memang kerjasama dengan pihak luar dalam memberikan pelatihan, maka lembaga pelatihan yang seperti apa yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (kriteria)?
7. Bagaimana pemilihan untuk instruktur sendiri, apakah ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pelatih?
8. Berapa lama pelatihan yang diberikan untuk setiap siswa?
9. Bagaimana dengan penentuan jadwal pelatihan?
10. Metode apa yang digunakan untuk mempermudah proses pelatihan?
11. Kurikulum apa yang digunakan dalam pelatihan?
12. Apakah ada semacam bantuan berupa misalnya dana, atau alat bagi peserta pelatihan yang telah selesai melaksanakan pelatihan?
13. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan program pelatihan ini?
14. Lalu adakah faktor yang menghambat dalam melaksanakaan program pelatihan ini?
    a. Bentuk faktor penghambat internal?
    b. Bentuk faktor penghambat eksternal?
15. Maka, apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini dalam mengatasi faktor penghambat itu sendiri?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN INSTRUKTUR PELATIHAN

Peneliti : Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Bapak Wanto (Lukis Kaca MB Glass), Bapak Didik (Budidaya Jamur Warna Garden, Bapak Drs. Mahendra (Service Hp BLK Otomotif dan LPK Intermedia)

Materi : Program Pelatihan Bagi Fakir Miskin

1. Apa tujuan lembaga ini didirikan? (selain mencari keuntungan)
2. Adanya pelatihan disini itu untuk apa?
3. Model kerjasama dengan Dinas Sosial itu seperti apa? (apakah ada usulan dana untuk pembeliaan alat, atau alat tersedia kemudian anggaran pelatihan dari pemerintah)
4. Apa saja peratalan yang digunakan untuk pelatihan?
5. Untuk ukuran pembelajaran, apakah kiranya sarana dan prasarana sudah cukup menunjang?
6. Metode yang dipergunakan seperti apa? (untuk teori berapa %, praktek %)
7. Untuk evaluasi atau praktek belajar sendiri bagaimana?
8. Bagaimana dengan jadwal pelatihan?
9. Apakah ada faktor pendukung dalam pelatihan ini? (misalnya anngaran dari pemerintah cukup untuk membantu pelengkapan saran prasarana)
10. Apakah ada hambatan dalam melatih?
    a. Secara internal (dilihat dari lembaga ini sendiri misalnya apakah sudah menunjang sarana dan prasarananya)
    b. Secara eksternal (dilihat dari siswa sendiri bagaimana)

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PESERTA PELATIHAN

Peneliti : Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Peserta Pelatihan

Materi : Program Pelatihan Bagi Warga Miskin

1. Tujuan anda mengikuti program ini?
2. Cara Mendaftar?
3. Bagaimana menurut anda instrukturnya?
4. Apakah sarana dan sarana sudah mencukupi?
5. Metode pengajaran seperti apa? (teori dan praktek)
6. Apakah ada hambatan dalam pelatihan ini? (sarana, instruktur)
7. Apa manfaat setelah mengikuti pelatihan ini? (yang didapat setelah mengikuti pelatihan apakah efektif)
8. Apakah ada bantuan dari pemerintah? (berupa alat atau dana untuk membeli peralatan)
9. Apakah sudah efektif dengan pemberian bantuan tersebut)
10. Yang mendukung pelatihan tersebut itu apa? (ada biaya transport, sanck, alat yang menunjang misalnya)

DOKUMEN PENELITI

Foto bersama Bapak S. Rohana selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Pelatihan Lukis Kaca (grafier) di rumah Bapak Wanto MB Glass Dawuhan Kota Blitar

Foto peserta pelatihan (warga miskin) saat praktek membuat lukis kaca (grafier)

Foto bersama Puput salah satu peserta pelatihan Lukis Kaca (grafier)

Foto bersama Bapak Wanto selaku Instruktur lukis kaca (grafier) sekaligus pemilik MB Glass

Foto hasil Lukis Kaca (grafier) yang dibuat oleh peserta pelatihan

Pelatihan Budidaya Jamur bertempat di Bendogertit Kota Blitar

Foto peserta pelatihan saat melakukan pembibitan dengan serbuk gergaji

Foto peserta pelatihan yang menunjukkan hasil budidaya jamur

Foto bersama Ibu Wiji Lestari selaku peserta pelatihan budidaya jamur

Foto bersama Bapak Didik (Warna Garden) selaku Instruktur pelatihan budidaya jamur

Pelatihan Service di BLK Otomotif dan LPK Intermedia

Foto peserta pelatihan saat service hp

Foto bersama Bapak Totok selaku peserta pelatihan service hp

Foto Bapak Totok saat menunjukkan bantuan alat dari pemerintah bagi peserta pelatiahan atas nama kelompok

Foto bersama Bapak Drs. Mahendra selaku instruktur service hp